

2018



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN
2018**





Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Tahun 2018 Kabupaten Sarolangun dengan visi “ *Sarolangun Lebih Sejahtera*’ untuk pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018 sebagai diamanatkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Hal ini sebagai perwujudan komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes dalam rangka penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel.

Sejalan dengan focus pada peningkatan akuntabilitas dan capaian kinerja, Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 memberikan informasi tentang capaian kinerja kegiatan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta hasil evaluasi capaian kinerja beserta permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Tahun 2018 serta komitmen untuk meningkatkan kinerja pada masa-masa mendatang.

"LKJ PEMERINTAH KAB.SAROLANGUN 2018"



perlu mendapatkan perhatian untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang. Kemudian Dalam penyusunan LKJ Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2018 ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi oleh masing-masing SKPD, namun diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai nara sumber yang kompeten. Mudah-mudahan LKJ Pemerintah Kabupaten Sarolangun dapat memberikan informasi bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan menjadi parameter peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun-tahun mendatang.





DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN ESEKUTIF.....	i
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I - 1
1.2. Kondisi Kabupaten Sarolangun	I - 3
1.2.1. Kondisi Geografis.....	I - 3
1.2.2. Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun	I - 5
1.2.3. Demografis Kabupaten Sarolangun.....	I - 5
1.2.4. Perekonomian Masyarakat.....	I - 7
1.2.4.1. Usaha Tanaman Pangan.....	I - 7
1.2.4.2. Perekonomian dan Peternakan.....	I - 9
1.2.4.3. Perkebunan	I -11
1.2.4.4. Energi dan Industri	I -11
1.2.4.4.1. Energi	I -11
1.2.4.4.2. Industri.....	I -13
1.2.4.5. Pariwisata.....	I -13
1.3. Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi	I -16
1.3.1. Kewenangan dan Tugas Pokok.....	I -16
1.3.2. Struktur Organisasi	I -18
1.4. Inovasi Dalam Sistem Akip dan Pengelolaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun.....	I -20



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan	II - 22
2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun	II - 25
2.1.1.1. Visi Kabupaten Sarolangun	II - 25
2.1.1.2. Misi Kabupaten Sarolangun.....	II - 26
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarolangun .	II - 30
2.1.2.1. Tujuan Pembangunan Kabupaten Sarolangun	II - 30
2.1.2.2. Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarolangun.....	II - 31
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	II - 36

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi	III -40
3.1.1. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	III -47
3.1.2. Rasio Desa Berlistrik.....	III -51
3.1.3. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik.....	III -54
3.1.4. Akses Terhadap Air Minum Layak	III -56
3.1.5. Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD.....	III -60
3.1.6. Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP	III -60
3.1.7. Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk	
Per 30.000 Penduduk.....	III -62
3.1.8. Persentase SD Yang Terakreditasi	III -63
3.1.9. Persentase SMP Yang Terakreditasi	III -63
3.1.10. Angka Harapan Hidup	III -64
3.1.11. Angka Kematian Ibu (AKI).....	III -65
3.1.12. Angka Kematian Bayi (AKB)	III -67



3.1.13. Prevelensee Balita Gizi Buruk.....	III -69
3.1.14. Persentase Puskesmas Terakreditasi	III -69
3.1.15. Contraceptive Prevalence Rate	III -71
3.1.16. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	III -74
3.1.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.....	III -76
3.1.18. Persentase Buta Aksara Al-Quran	III -78
3.1.19. Pertumbuhan Ekonomi	III -79
3.1.20. Indeks Gini	III -82
3.1.21. Persentase Penduduk Miskin.....	III -83
3.1.22. Indeks Desa Membangun (IDM)	III -84
3.1.23. Pengeluaran Perkapita	III -84
3.1.24. Persentase Tercukupinya Pangan Pada Tingkat Rumah Tangga Dalam Jumlah, Mutu, Ragam, Keamanan Serta Keterjangkauan Harga.....	III -85
3.1.25. Tingkat Pencemaran Lingkungan.....	III -88
3.1.26. Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	III -89
3.1.27. Predikat Sakip.....	III -91
3.1.28. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan.....	III -91
3.1.29. Tingkat Keselarasan Antara Renja SKPD Dengan Dokumen Perencanaan Diatasnya	III -92
3.1.30. Persentase Penyelesaian Perda	III -93
3.1.31. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	III -95
3.1.32. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	III -95



3.1.33. Indeks Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	III -96
3.1.34. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan	III -98
3.1.35. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan ..	III -100
3.1.36. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kependudukan	III -101
3.2. Akuntabilitas Keuangan	III -102
3.2.1. Komposisi APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2018.....	III -103
3.2.2. komposisi PAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2018	III -105
3.2.3. komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2018	III -107
3.2.4. komposisi Belanja Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2018	III -108
3.2.5. kesehatan Keuangan Daerah.....	III -109
3.2.6. Analisis Kapasitas Fisikal Daerah	III -109
3.2.7. Analisis Ruang Fiskal Daerah	III -111
3.3. Pendapatan.	III - 112
BAB IV PENUTUP	IV - 113

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2018 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 dan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2018 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2018. Dalam upaya merealisasikan *good governance*, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022.

Berdasarkan hasil evaluasi sepanjang tahun 2018 terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sarolangun, masih terdapat satu sasaran yang belum memuaskan atau dalam kategori kurang. Adapun pencapaian sasaran secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 19 (Sembilan Belas) Sasaran Strategis atau 98 % diperoleh pencapaian baik sekali yang berimplikasi terhadap pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- 1 (Satu) Sasaran Strategis atau 1 % diperoleh pencapaian baik yang berimplikasi terhadap pencapaian Visi, Misi serta Tujuan Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- 1 (Satu) Sasaran Strategis atau 1 % diperoleh pencapaian kurang yang hal tersebut akan ditindaklanjuti.



Tabel Pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun

2018 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	RATA -RATA TINGKAT CAPAIAN	KATEGORI
1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1 Indikator	101,62	Baik Sekali
2.	Terwujudnya Infrastruktur Listrik yang Memadai	1 Indikator	107,84	Baik Sekali
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih	2 Indikator	103,025	Baik Sekali
4.	Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya	3 Indikator	91,123	Baik Sekali
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	2 Indikator	101,83	Baik Sekali
6.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	6 Indikator	123,058	Baik Sekali
7.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi	2 Indikator	125,085	Baik Sekali
8.	Meningkatnya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat	1 Indikator	95.23	Baik Sekali
9.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	1 Indikator	102,62	Baik Sekali
10.	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah	1 Indikator	114	Baik Sekali
11.	Menurunnya Angka Kemiskinan	1 Indikator	102,31	Baik Sekali
12.	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Daesa	1 Indikator	83,34	Baik
13.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan	1 Indikator	125	Baik Sekali
14.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Indikator	124,70	Baik Sekali



NO	SASARAN	INDIKATOR	RATA - RATA TINGKAT CAPAIAN	KATEGORI
15.	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	1 Indikator	200	Baik Sekali
16.	Mempertahankan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Perubahan Iklim	1 Indikator	200	Baik Sekali
17.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan yang Baik	2 Indikator	150	Baik Sekali
18.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	1 Indikator	105	Baik Sekali
19.	Meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum	1 Indikator	47,06	Kurang
20.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	3 Indikator	170,59	Baik Sekali
21.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	3 Indikator	102,35	Baik Sekali

Dari tabel diatas terdapat 1 (Satu) Sasaran yang capaian kinerjanya kriteria kurang yaitu pada sasaran *meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum*, adapun rata-rata capain kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2018 adalah sebesar 99% Pencapaian kinerja input dan penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2018 adalah sebesar 104, 53% dari total pagu Anggaran atau sebesar Rp. 1.250.110.485.541,80

Melalui Laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana sebagai daerah otonom Propinsi, Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta mengatur sumber-sumber penerimaan daerah agar mampu membiayai kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan masyarakat serta meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam pembangunan, sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah.

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,



Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara termasuk Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan dimana laporan tersebut menggambarkan kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

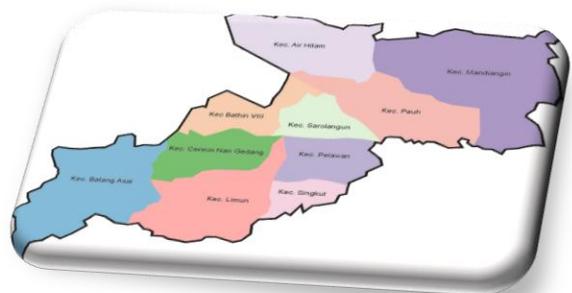
LKj merupakan bagian dari SAKIP yang secara implisit merupakan suatu bentuk asertasi atas kinerja instansi pemerintah, dalam rangka perbaikan dan mendorong terwujudnya pemerintahan Kabupaten Sarolangun yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) dalam penyelenggaraan pemerintahan serta bahan evaluasi perbaikan pelayanan dan kinerja Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah.

1.2. Kondisi Kabupaten Sarolangun

Secara yuridis formal Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi resmi terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya diperkuat dengan keputusan DPRD Propinsi Jambi Nomor 2/DPRD/1999 tanggal 9 Juli 1999 tentang Pemekaran Kabupaten di Propinsi Jambi.

1.2.1. Kondisi Geografis Daerah

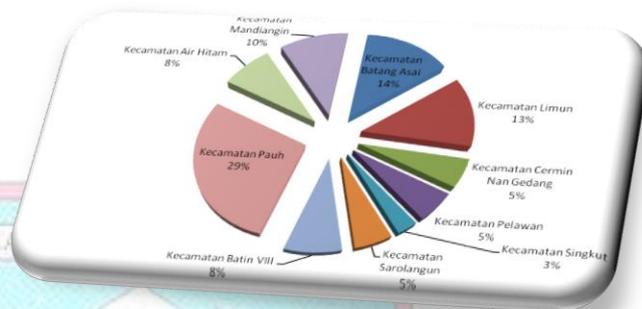
Kabupaten Sarolangun berada pada posisi $102^{\circ} 03' 39''$ sampai $103^{\circ} 13' 17''$ BT dan $01^{\circ} 53' 39''$ LS sampai $02^{\circ} 46' 24''$ LS (Meridian Greenwich) terletak di wilayah Barat Propinsi Jambi. Ibukota Kabupaten berada di Kota Sarolangun yang berjarak lebih kurang 179 Km dari Ibukota Propinsi Jambi.





Kabupaten Sarolangun termasuk beriklim tropis. Keadaan iklim rata-rata berkisar antara 23°C sampai dengan 32°C dengan kelembaban udara rata-rata berkisar 78% dan curah hujan rata-rata 260 mm, Kabupaten Sarolangun merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sarolangun Bangko terletak pada ketinggian 20 sampai dengan 1.950 m dari permukaan laut (dpl).

Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 Kecamatan 9 Kelurahan dan 149 Desa. Rincian masing-masing kecamatan sebagai berikut : Kecamatan Batang Asai terdiri dari 23 Desa definitif dan



tidak ada kelurahan serta semua desa berstatus desa pedesaan. Kecamatan Limun terdiri dari 16 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Cermin Nan Gedang terdiri dari 10 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Pelawan terdiri dari 14 Desa definitif, tidak ada kelurahan dan semua desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Singkut terdiri dari 10 Desa definitif, dan 1 kelurahan yaitu Sungai Benteng. Salah satu desa (desa Bukit Tigo) berstatus desa perkotaan sedangkan yang lainnya merupakan desa pedesaan. Kecamatan Sarolangun terdiri dari 10 desa definitif dan 6 kelurahan yaitu kelurahan Dusun Sarolangun, kelurahan Pasar Sarolangun, kelurahan Sukasari, Kelurahan Aur Gading, Kelurahan Gunung Kembang dan kelurahan Sarolangun Kembang. Dari 15 desa/kelurahan tersebut, 2 desa/kelurahan berstatus desa/kelurahan perkotaan (Kelurahan Pasar Sarolangun dan kelurahan Sukasari), sisanya



adalah desa/kelurahan pedesaan. Kecamatan Batin VIII terdiri dari 14 desa definitif dan 1 kelurahan yaitu Limbur Tembesi dan seluruh desa merupakan desa pedesaan.

Kecamatan Pauh terdiri dari 13 Desa definitif, 1 kelurahan yaitu kelurahan Pauh dan seluruh desa merupakan desa pedesaan. Kecamatan Air Hitam terdiri dari 9 Desa definitif, dan seluruh desa merupakan desa pedesaan Kecamatan Mandiangin terdiri dari 28 Desa definitif semua desa merupakan desa pedesaan.

1.2.2. Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun

Luas Wilayah Kabupaten Sarolangun 6.174 km². Batas-batas wilayah Administrasi Kabupaten Sarolangun Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari, Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin.

Luas masing-masing kecamatan adalah : Kecamatan Batang Asai 858 km², Kecamatan Limun 799 km², Kecamatan Cermin Nan Gedang 320 km², Kecamatan Pelawan 330 km², Kecamatan Singkut 173 km², Kecamatan Sarolangun 319 km², Kecamatan Batin VIII 498 km², Kecamatan Pauh 1.770 km², Kecamatan Air Hitam 471 km², Kecamatan Mandiangin 636 km².

1.2.3. Demografis Kabupaten Sarolangun

Menurut Laporan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, jumlah penduduk, wajib KTP dan KK Kabupaten Sarolangun Pada tahun 2018 sebesar **317.317** jiwa, terdiri dari **163.249** laki-laki dan **154.068** perempuan. Kemudian dapat kita lihat jumlah penduduk yang wajib ber KTP terdiri dari **114.514** laki-laki dan **108.697** perempuan serta jumlah KK terdiri dari **75.709** laki-laki



dan **8.389** perempuan. Total wajib KTP pada tahun 2018 disemester II sebesar **223.211** dan total jumlah KK pada tahun 2018 semester II sebesar **84.098**.

TABEL 1.1
JUMLAH PENDUDUK, WAJIB KTP DAN KK MENURUT JENIS KELAMIN PER
KECAMATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SAROLANGUN
SEMESTER II TAHUN 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			WAJIB KTP (JIWA)			JUMLAH KK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	BATANG ASAI	10.577	10.393	20.970	7.541	7.386	14.927	4.609	794	5.403
2	LIMUN	10.220	9.699	19.919	7.056	6.790	13.846	4.511	592	5.103
3	SAROLANGUN	30.757	29.163	59.920	21.110	20.430	41.540	13.996	1.732	15.728
4	PAUH	14.233	13.362	27.595	10.071	9.313	19.384	6.601	608	7.209
5	PELAWAN	19.407	18.458	37.865	13.750	13.028	26.778	9.097	949	10.046
6	MANDIANGIN	21.078	19.530	40.608	14.768	13.760	28.528	9.941	932	10.873
7	AIR HITAM	15.536	14.204	29.740	11.240	10.265	21.505	7.499	531	8.030
8	BATHIN VIII	11.799	11.206	23.005	8.396	8.144	16.540	5.562	757	6.319
9	SINGKUT	21.748	20.588	42.336	15.238	14.491	29.729	10.442	1.011	11.453
10	CERMIN NAN GEDANG	7.894	7.465	15.359	5.344	5.090	10.434	3.451	483	3.934
	TOTAL	163.249	154.068	317.317	114.514	108.697	223.211	75.709	8.389	84.098

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Sarolangun (data diolah)



1.2.4. Perekonomian Masyarakat

1.2.4.1. Usaha Tanaman Pangan

Pada tahun 2015 luas area produksi padi di kabupaten Sarolangun seluas 10.575 ha dengan jumlah produksinya 50.226 ton atau 4.75 ton per hektar. Sedangkan pada tahun 2016 luas area produksi padi seluas 15.575 ha dengan jumlah produksi 66.343 ton atau 4.16 ton per hektar. Untuk lebih rincinya dapat dilihat pada table 1.2 di bawah ini

TABEL 1.2.
LUAS AREA PRODUKSI DAN JUMLAH PRODUKSI KOMODITI PERTANIAN DI
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016

No	Komoditi	Jumlah	Satuan	No.	Komoditi	Jumlah	Satuan
		2016				2016	
1.	Padi						
	a. Luas Panen	15.575	Ha		a. Jumlah Produksi	2.570	Ton
	b. Jumlah Produksi	66.343	Ton		b. Produktifitas	19	Ton/Ha
	c. Produktifitas	4.16	Ton/Ha				
2.	Jagung			5.	Ketela Rambat		
	a. Luas Panen	908	Ha		a. Luas Panen	31	Ha
	b. Jumlah Produksi	3.474	Ton		b. Jumlah Produksi	652	Ton
	c. Produktifitas	4.82	Ton/Ha		c. Produktifitas	21.25	Ton/Ha
3.	Kedelai			6.	Kacang tanah		
	a. Luas Panen	499	Ha		a. Luas Panen	58	Ha
	b. Jumlah Produksi	537	Ton		b. Jumlah Produksi	60	Ton
	c. Produktifitas	1.07	Ton/Ha		c. Produktifitas	1.05	Ton/Ha
4.	Ketela Pohon			7.	Kacang Hijau		
	a. Luas Panen	135	Ha		a. Luas Panen	12	Ton
					b. Jumlah Produksi	15	Ton/Ha
					c. Produktifitas	1.24	

(Sumber Dinas TPHP Kab. Sarolangun, 2018)



Disamping komoditi tanaman strategis (Padi, Jagung dan Kedelai) juga diusahakan tanaman palawija dan hortikultura. Tanaman palawija yang diusahakan petani Kabupaten Sarolangun meliputi Ketela Pohon, Ketela Rambat, Kacang Tanah dan Kacang Hijau. Sedangkan hortikultura terdiri dari Buah – buahan dan sayuran, antara lain Alpokat, Mangga, Rambutan, Duku, Jeruk, Durian , Sawo, Pepaya , Pisang, Nanas, Manggis, Nangka, Salak dan Sirsak. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.3. dibawah ini :

TABEL. 1.3.
BANYAK TANAMAN , TANAMAN DIPANEN DAN RATA – RATA PRODUKSI TANAMAN BUAH – BUAHAN MENURUT JENIS TANAMAN TAHUN 2017.

No	Jenis Tanaman	Banyak Tanaman (Batang)	Banyak Tanaman Dipanen (Batang)	Rata-rata Produksi (Ton/Ha)
1.	Alpokat	968	150	2
2.	Mangga	9.831	610	1.5
3.	Rambutan	22.871	915	6
4.	Duku	89.598	2.008	2.5
5.	Jeruk	50.656	90	12
6.	Durian	121.578	1.805	2.5
7.	Sawo	7.619	601	3.5
8.	Pepaya	5.974	2.256	60
9.	Pisang	304.005	5.675	20
10.	Nanas	9.006	107	60
11.	Belimbing	4.411	578	5
12.	Manggis	17.863	101	2
13.	Nangka	21.205	1.288	4.5
14.	Salak	14.853	6.664	18
15.	Sirsak	1.246	113	7.5

(Sumber : Dinas TPHP Kab. Sarolangun,2018)

Selain tanaman buah- buahan di Kabupaten Sarolangun, masih ada tanaman hortikultura lainnya yakni tanaman sayur-sayuran seperti : Cabe, Kacang panjang , Tomat, Terong, Buncis, Ketimun, Labu Siam , Kankung dan Bayam.



1.2.4.2. Perikanan dan Peternakan

Potensi sumber daya perikanan di Kabupaten Sarolangun terdiri dari kolam, keramba dan perairan umum (sungai & Danau). Produksi perikanan yang terdapat di Kabupaten Sarolangun tahun terakhir (Tahun 2017) sebesar 3.170 ton. Dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.4 dibawah ini :

TABEL 1.4.
JUMLAH PRODUKSI DAN NILAI BUDI DAYA IKAN DI KOLAM DAN KERAMBA PER KECAMATAN DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017.

No	Kecamatan	Kolam (Ton)	No	Kecamatan	Kolam (Ton)
1	Sarolangun	465	6	Batang Asai	350
2	Pelawan	300	7	Pauh	200
3	Singkut	650	8	Mandiingin	430
4	Limun	288	9	Bathin VIII	100
5	Cermin nan Gedang	110	10	Air Hitam	177

(Sumber Dinas Peternakan dan Perikanan, 2018)

TABEL 1.5.
JENIS PERIKANAN YANG BUDIDAYANYA DI KOLAM DAN KERAMBA DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017.

No.	Jenis Ikan	Tahun 2017		No	Jenis Ikan	Tahun 2017	
		Produksi (Ton)	Nilai (Rp.00)			Produksi (Ton)	Nilai (Rp.00)
1	Ikan Mas	252	6.552	3	Ikan Patin	353	6.851
2	Ikan Nila	2.105	50.520	4	Lainnya	460	11.100
Jumlah						3.170	75.023

(Sumber Dinas Peternakan dan Perikanan, 2018)

Penyelenggaraan bidang usaha peternakan cukup berkembang di Kabupaten Sarolangun. Hal ini dapat dilihat beragamnya jenis ternak yang diusahakan oleh masyarakat . populasi ternak pada tahun 2014 dan 2015 di Kabupaten Sarolangun dan gambaran tentang rincian usaha peternakan berkenaan dengan jenis ternak yang diusahakan dapat dilihat pada tabel 1.6. dibawah ini :



TABEL 1.6.
POPULASI KEADAAN PENGELOLAAN USAHA PETERNAKAN DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 – 2017

No	Jenis Usaha Ternak	Jumlah		Satuan
		2016	2017	
1	Ternak Sapi Potong			
	a. Jumlah Populasi	9.225	9.419	Ekor
	b. Jumlah Pemotongan per tahun	1.780 227.147	1.782 -	Ekor Kg
	c. Jumlah Produksi Daging Ternak			
2	Ternak Kerbau			
	a. Jumlah Populasi	8.145	8.754	Ekor
	b. Jumlah Pemotongan per tahun	1.187 242.291,20	1.474 -	Ekor Kg
	c. Jumlah Produksi Daging Ternak			
3	Ternak Kecil (Kambing)			
	a. Jumlah Populasi Kambing	45.658	55.735	Ekor
	b. Jumlah Pemotongan per tahun	3.654 40.705,56	3.653 -	Ekor Kg
	c. Jumlah Produksi (Domba)	16.293	25.126	Ekor
	a. Jumlah Populasi Domba	1.369	1.372	Ekor
	b. Jumlah Pemotongan per tahun	15.086,38	-	Kg
	c. Jumlah Produksi			
4	Unggas			
	a. Ayam kampung			
	- Jumlah Populasi	324.603	327.424	Ekor
	- Produksi Daging	347.803,39	361.673	Kg
	- Produksi Telur	2.537.691	2.842.057	Butir
	b. Jumlah Ayam Pedaging			
	- Jumlah Populasi	405.108	405.108	Ekor
	- Produksi Daging	398.499,60	399.413	Kg
	c. Jumlah Ayam Petelur			
	- Jumlah Populasi	138.068		Ekor



- Produksi Daging	901.119	138.891	Kg
d. Jumlah itik			
- Jumlah Populasi	44.473	41.599	Ekor
- Produksi Daging	15.540,80	14.044	Kg
- Produksi Telur	2.849.189,88	2.577.110	Butir

(Sumber Dinas Peternakan dan Perikanan, 2018)

1.2.4.2.1. Perkebunan

Kabupaten Sarolangun memiliki potensi untuk pengembangan Perkebunan Khususnya perkebunan kelapa sawit dan karet, dimana merupakan usaha bidang perkebunan yang paling dominan perkembangannya . Hal ini terlihat dari jumlah luas area perkebunan dan jumlah produksi yang cukup besar . Luas perkebunan Karet di Kabupaten Sarolangun sebanyak 126.725 hektar dan luas perkebunan sawit sebanyak 35.454 hektar pada tahun 2016. Selain itu, usaha perkebunan yang juga berkembang di kabupaten Sarolangun adalah kopi, lada, pinang, kulit kayu manis, Kelapa dalam, Nilam dan tebu.

1.2.4.3. Energi Dan Industri

1.2.4.3.1. Energi

Jangkauan pelayanan energi listrik yang ada di kabupaten Sarolangun meliputi hampir seluruh wilayah baik perkotaan dan pedesaan. Sampai tahun 2015, jangkauan pelayanan energi listrik yang ada di Kabupaten Sarolangun sudah mencapai seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun walaupun masih ada sedikit desa yang belum terjangkau dan masih ada pemadaman listrik sekali – kali. Jumlah desa yang belum teraliri listrik pada tahun 2015 sebanyak 18 desa dalam kabupaten Sarolangun . Apalagi dengan telah dibangunnya PLTU Samaran



maka akan dapat memenuhi seluruh kecamatan di Kabupaten Sarolangun bahkan surplus sumber energi listrik di Kabupaten Sarolangun. Apabila produksi energi listrik yang bersumber dari bahan baku batu bara yang tersedia dapat di kelola di Kabupaten Sarolangun sendiri, maka akan dapat untuk memenuhi kebutuhan energi listrik Kabupaten tetangga. Jumlah sumber energi listrik Kabupaten Sarolangun tahun 2016 – 2017 dapat dilihat pada tabel 1.7.berikut :

TABEL 1.7.
JUMLAH SUMBER ENERGI LISTRIK KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2016 – 2017

No	Sumber Energi Listrik	Tahun 2016		Tahun 2017			
		Banyaknya Mesin (Unit)	Daya Terpasang (Kw)	Daya Mampu (Kw)	Banyaknya Mesin (Unit)	Daya Terpasang (Kw)	Daya Mampu (Kw)
1	PLTG	-			-	-	-
2	PLTD Batang Asai	4	920	920	4	920	600
3	PLTS	-	-	-	-	-	-
4	PLTU Semaran	2	14.000	12.000	2	14.000	12.000

(Sumber Sarolangun Dalam Angka, 2018)

Sumber energi lain yang juga memiliki peranan penting bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun adalah ketersediaan bahan bakar terutama minyak tanah , bensin, dan solar. Untuk menunjang pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak bagi masyarakat kabupaten Sarolangun, di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2016 terdapat fasilitas pelayanan seperti keberadaan SPBU sebanyak 6 Unit , dan UPPDN Pertamina sebanyak 2 Unit . Jumlah masing – masing fasilitas pelayanan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.8.



TABEL 1.8.
JUMLAH SARANA PELAYANAN BAHAN BAKAR KABUPATEN SAROLANGUN
TAHUN 2016 – 2017

No	Sarana Pelayanan Bahan Bakar	Jumlah		Satuan
		2016	2017	
1	SPBU	6	7	Buah
2	Depo Minyak Tanah	27	27	Buah
3	UPPDN Pertamina	2	2	Buah

(Sumber Sarolangun Dalam Angka, 2018)

1.2.4.3.2. **Industri**

Industri di Kabupaten Sarolangun setiap tahun mengalami peningkatan baik jumlah unit usaha tenaga kerja, nilai investasi maupun produksinya. Jumlah industry kecil dan menengah di Kabupaten Sarolangun tahun 2016 dan 2017 sebanyak 1200 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 3.666 orang.

Dan pada tahun 2015 ada 5 perusahaan yang berskala besar yang bergerak di bidang usaha industry pengolahan buah sawit atau pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) dengan kapasitas produksi 45-60 ton/jam yakni PT. Krena Duta Agrindo (KDA), PT. Bahana Karya Semesta, PT. Inti Guna Nabati (IGUN), PT. Lambang Sawit Perkasa (LSP) dan PT. Sukses Gemilang Palm (SGP), sedangkan untuk jenis usaha crumb rubber pada tahun 2015 sebanyak 1 perusahaan yakni PT. HEVEA dan pada tahun 2016 terjadi penambahan 1 perusahaan crumb rubber yakni PT. Karet Bathin VIII yang berlokasi di kecamatan Bathin VIII.



1.2.4.4. Pariwisata

Potensi pariwisata Kabupaten Sarolangun yang juga dikenal dengan bumi sepucuk Adat Serumpun Pseko ini, sangat menjanjikan dengan berbagai jenis objek wisata mulai dari wisata alam hingga wisata budaya dan sejarah.

Potensi – potensi wisata ini tersebar di berbagai kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Objek yang umumnya adalah objek wisata alam, selain itu juga wisata ziarah, wisata minat khusus, wisata budaya dan wisata sejarah. Meski demikian , sebagian objek wisata yang terdapat di Kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun butuh perhatian dan pemeliharaan serta pengelolaan yang baik agar dapat dinikmati baik oleh masyarakat Sarolangun maupun para wisatawan dari luar Kabupaten Sarolangun. Gambaran potensi wisata di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.9:

TABEL 1.9.
GAMBARAN POTENSI OBJEK WISATA YANG ADA
DI KABUPATEN SAROLANGUN.

No	Kecamatan	Nama Objek Wisata	Keterangan
1	Sarolangun	Perkampungan Tradisional Muaro Sawah Panorama di antara Dua Jembatan Panorama Jembatan Beatrix Taman Perkantoran Gunung Kembang Danau Ladang Panjang Mesjid Al-Falah Pasar Sarolangun Mesjid Al- Sulthon Sarolangun Sport Center “ Sarolangun Emas”	Wisata Budaya Wisata ALam Wisata Alam Wisata Buatan Wisata Alam Wisata Alam Wisata Rohani Wisata Rohani Wisata Kesehatan Jasmani
2	Batang Asai	Danau Kaco Minyak Wajang wali Air Terjun Telun Tujuh Air Terjun Mudek Niban Air Terjun Rantau Uba Air Terjun Narso Air Terjun Inum Air Terjun telun seluro	Wisata ALam Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam Wisata Alam



		Makam Keramat Panorama Bukit Rayo Panorama Sungai Batang Asai Pendulang emas Tradisional Makam Keramat Bukit Lupo Batu Tinggi Arum Jeram Ma. Talang Olah Raga Paralayang	Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Minat Khusus Wisata Minat Khusus
3	Air Hitam	Taman Nasional Bukit Dua Belas Komunitas Suku Anak Dalam (SAD) Habitat Kayu Bulian Habitat Tanaman Anggrek/Neventes Air Panas Paku Aji Sungai Air Jernih Air Terjun Talun Batu Sesudung Batu Batumang Air Meruap Jernih	Wisata Alam Wisata Budaya Ecowisata Ecowisata Ecowisata Wisata Alam Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Budaya Wisata Alam
4	Limun	Dam Muaro Kutur Goa Bukit Bulan Goa Calow Petak Panorama Alam Bukit Temalun Panorama Alam Bukit Bulan Panorama Alam Bukit Barisan Panorama Hutan Adat Panorama Sungai Batang Limun Panorama Sungai Muaro Limun Panorama Sungai Binjai Lubuk Bedorong	Wisata Alam Wisata Alam
5	Mandiingin	Hutan Masyarakat	Wisata Alam
6	Pauh	Danau Pauh Batu Tulis	Wisata Alam Wisata Budaya
7	Pelawan	Danau Kampung Pulau Danau Godang Semaru Perkebunan Durian Semaru Persawahan Payo Mangkuang Makam Karomah Datuk Ijuk Lesung Batu Desa Lubuk Sepuh Lesung Batu Desa Rantau Tenang Rumah Tuo Lubuk Sepuh	Wisata Alam Wisata Budaya Wisata Alam Wisata Alam Wisata Agro Wisata Agro Wisata Budaya Wisata Budaya

Pengembangan kegiatan wisata di kabupaten Sarolangun perlu didukung usaha perhotelan. Usaha perhotelan di Kabupaten Sarolangun baru mulai bergeliat sepanjang tahun 2015-2017, salah satunya dengan berdirinya Hotel Abadi di Sentra Bisnis



Sarolangun yang mulai beroperasi pada tahun 2008. Meski jenis hotel yang dominan di Kabupaten Sarolangun meliputi jenis hotel non bintang, namun usaha perhotelan di kabupaten Sarolangun mulai menjanjikan terutama sejak Pemkab Sarolangun dapat dilihat pada tabel 1.10 berikut :

TABEL 1.10
JUMLAH HOTEL DI KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 – 2017

No	Jenis Hotel	Jumlah		Satuan	No	Jenis Hotel	Jumlah		Satuan
		2016	2017				2016	2017	
1	Hotel Bintang Lima	-	-	Buah	5	Hotel Bintang Satu	-	-	Buah
2	Hotel Bintang Empat	-	-	Buah	6	Hotel Non Bintang	7	7	Buah
3	Hotel Bintang Tiga	1	1	Buah	7	Penginapan	7	7	Buah
4	Hotel Bintang Dua	-	-	Buah					

(Sumber Sarolangun Dalam Angka, 2018)

1.3. Kewenangan dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi

1.3.1. Kewenangan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dimaksud adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh



pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat(2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. sosial

Urusan Pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) meliputi;

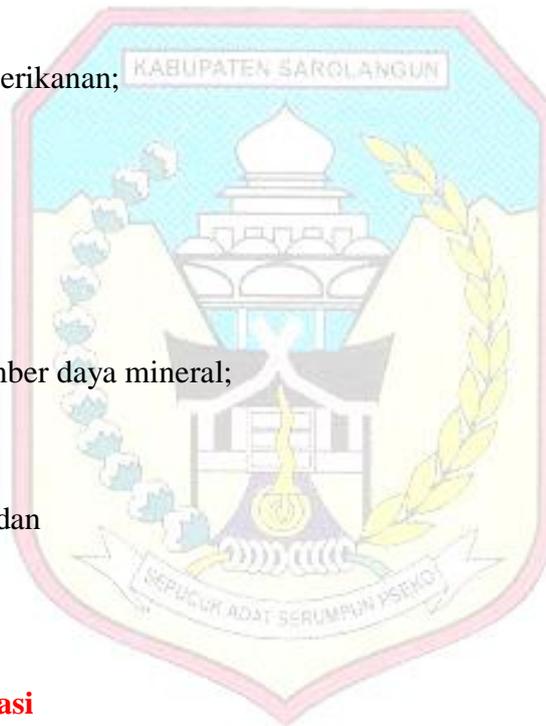
- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;



- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan

Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan pilihan dimaksud meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan
- h. Transmigrasi.



1.3.2. Struktur Organisasi

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun kembali menyesuaikan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Susunan organisasi tersebut dijabarkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah



dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sarolangun dan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dalam Kabupaten Sarolangun.

Pada tahun 2017 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sarolangun terdiri atas Sekretariat Daerah (9 Bagian), Sekretariat DPRD, Inspektorat, Satuan Pol PP, RSUD, 8 Badan, 14 Dinas, 3 Kantor, 10 Kecamatan dan 9 Kelurahan.

Selain tata pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan, Persentase aparatur pemerintah (ASN) Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 juga didukung oleh Apartaur yang sangat memadai. Dari jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 4.500 orang, aparatur pemerintah Kabupaten Sarolangun dari segi tingkat pendidikan dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel.1.11.

Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	12	0,26
2	SLTP	28	0,62
3	SLTA	1.015	22,55
4	D1	50	1,11
5	D2	517	11,48



6	D3	533	11,84
7	S1	2.173	48,28
8	S2	168	3,73
9	S3	4	0,08
	JUMLAH	4.500	100

(Sumber Data BKPSDM Kab. Sarolangun)

Melihat latar belakang dan tingkat pendidikan ASN di Pemerintah Kabupaten Sarolangun maka sangat berpeluang untuk dapat mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kab. Sarolangun tahun 2017-2022.

Jika dilihat berdasarkan tingkat kepangkatan maka persentase golongan aparatur pemerintah (PNS) Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Golongan I sebesar 0,8%, Golongan II sebesar 27,57% dan Golongan III sebesar 53,46% dan golongan IV sebesar 18,15% .

1.4. Inovasi Dalam Sistem Akip dan Pengelolaan Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun



Untuk mewujudkan pemerintah yang berbasis elektronik (*e-Government*), Pemerintah Kabupaten sarolangun telah melakukan inovasi sistem pelaporan dengan menggunakan sistem E-SAKIP yang diadopsi dari Pemerintah Kota Bandung

melalui Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Pemerintah Kota Bandung yang yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 17/HK.HAM/X/2018 dan nomor 119/3996-Bag. KS tanggal 30 Oktober 2018.



Dengan sistem berbasis elektronik ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaporan Akuntabilitas yang pada akhirnya akan mewujudkan efisiensi dan efektifitas baik program maupun anggaran.



Gambar. 1.1
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Tentang E-SAKIP
Antara
Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2018



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menetapkan **Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan Bupati Nomor 486/BAPPEDA/2017** tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Sarolangun juga melakukan evaluasi pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama, pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan evaluasi dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

2.1. Perencanaan

Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah, diberi ruang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui



peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kerangka dasar pemberian otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, hal ini diharapkan juga dapat meningkatkan daya saing yang ada di daerah. Oleh karena itu, kebijakan yang disusun di daerah pada dasarnya dilakukan untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Secara eksplisit undang-undang otonomi menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut memperhatikan kewenangan yang diberikan, baik yang terkait dengan hubungan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, pelayanan umum serta keuangan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan RPJMD disusun sesuai dengan Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, agar terwujud *good government*. Dalam mensinkronisasikan prioritas nasional antara pusat-daerah dan antar daerah penyusunan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 juga mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025, RPJM Nasional Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Tahun 2016-2021, RPJMD Provinsi Tetangga, RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga, RPJP Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarolangun Tahun 2009-2029 serta sejumlah kebijakan dan prioritas program pemerintah dan pemerintah provinsi, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal maupun horizontal antar tingkat pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional Pemerintah Kabupaten Sarolangun



telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022.

RPJMD Kabupaten Sarolangun merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun terpilih selama 5 tahun ke depan. Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program-program pembangunan.

2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Sarolangun

2.1.1.1. Visi Kabupaten Sarolangun

Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 tahun sesuai tugas yang diemban. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Sarolangun selama lima tahun (2017-2022) adalah visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu:

“SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA”.

Visi tersebut terdiri dari dua- frase, yaitu lebih dan sejahtera. Frase lebih menunjukkan kemajuan, peningkatan, perbaikan, percepatan dan daya saing dalam seluruh aspek pembangunan. Sedangkan kata sejahtera mengacu pada kondisi dimana masyarakat Kabupaten Sarolangun mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses



terhadap informasi, pelayanan publik yang baik, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman. Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari pentahapan capaian pembangunan sesuai dengan arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) sebagaimana tercantum dalam Perda Kabupaten Sarolangun Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sarolangun Tahun 2006-2026.

2.1.1.2. Misi Kabupaten Sarolangun

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran dan kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah untuk mencapai visi. Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Sarolangun ditetapkan 6 (enam) Misi Pembangunan Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum***
- 2. Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya***
- 3. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal***
- 4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan***
- 5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender***
- 6. Meningkatkan pelayanan publik.***

Berangkat dari Visi dan Misi tersebut maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.



1. Dalam rangka pencapaian Misi I yaitu ***Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum***, maka tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :
 1. ***Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan***, dengan ***sasaran pembangunan*** :
 - a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
 2. ***Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur listrik***, dengan ***sasaran pembangunan*** :
 - a. Terwujudnya infrastruktur listrik yang memadai
 3. ***Mewujudkan peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih***, dengan ***sasaran pembangunan*** :
 - a. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih
 4. ***Mewujudkan Ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya***, dengan ***sasaran pembangunan*** :
 - b. Meningkatnya Percepatan Pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya
2. Dalam rangka pencapaian Misi II yaitu ***Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial bdaya***, maka tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :
 1. ***Mewujudkan Peningkatan kualitas pendidikan, Kesehatan serta kualitas tenaga kerja***, dengan ***sasaran pembangunan*** :
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan
 - b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatnya kualitas tenaga kerja sesuai kompetensi



2. ***Mewujudkan penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan, dengan sasaran pembangunan :***
 - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan pengembangan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat

3. Dalam rangka pencapaian Misi III yaitu ***Meningkatkan Perekonomian Daerah Dan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal***, maka tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :
 1. ***Meningkatkan perekonomian daerah, dengan sasaran pembangunan :***
 - a. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi
 - b. Menurunnya kesenjangan antar wilayah
 - c. Menurunnya angka kemiskinan
 - d. Meningkatnya kapasitas dan kemandirian desa
 2. ***Mewujudkan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK), dengan sasaran pembangunan :***
 - a. Meningkatnya pendapatan masyarakat desa/kelurahan
 3. ***Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan daerah, dengan sasaran pembangunan :***
 - a. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal

4. Dalam rangka pencapaian Misi IV yaitu ***Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Optimal Dan Berkelanjutan***, maka tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut:
 1. ***Peningkatan Kualitas Dan Kelestarian Sumberdaya Air Dan Lahan, dengan sasaran pembangunan :***



- a. Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan
2. ***Mewujudkan Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup***, dengan *sasaran pembangunan* :
 - a. Mempertahankan kualitas kelestarian lingkungan hidup terhadap perubahan iklim
5. Dalam rangka pencapaian Misi V yaitu ***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Responsif Gender***, maka tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :
 1. ***Mewujudkan Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik***, dengan *sasaran pembangunan* :
 - a. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan yang baik
 - b. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas
 2. ***Mewujudkan Peningkatan Jaminan Kepastian Dan Perlindungan Hukum***, dengan *sasaran pembangunan* :
 - a. Meningkatnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
 3. ***Mewujudkan Peningkatan Kesetaraan Gender***, dengan *sasaran pembangunan* :
 - a. Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak
6. Dalam rangka pencapaian Misi VI yaitu ***Meningkatkan Pelayanan Publik***, maka tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :
 1. ***Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik***, dengan *sasaran pembangunan* :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.



2.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarolangun

2.1.2.1. Tujuan Pembangunan Kabupaten Sarolangun

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (Lima) tahun. Tujuan merupakan target yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki dengan indikator keberhasilan yang terukur

Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan dari perencanaan kinerja lima tahunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD (*performance indikator*). Untuk itu tujuan mempunyai posisi strategis dalam pencapaian visi dan misi yang dalam kurun waktu 2017-2022 Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengelompokkan atas 15 (Lima Belas) tujuan sebagai berikut:

TABEL 2.1
PENGELOMPOKAN MISI DAN TUJUAN TAHUN 2018

MISI		NO	TUJUAN
PERTAMA	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Umum	1.	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan
		2.	Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur listrik
		3.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih
		4.	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya
KEDUA	Meningkatkan Kualitas SDM Penguatan Nilai-Nilai Agama dan Sosial Budaya	5.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Kualitas Tenaga Kerja
		6.	Mewujudkan Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Dalam Pembangunan



MISI		NO	TUJUAN
KETIGA	Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Berbasis Potensial Lokal	7.	Meningkatkan Perekonomian Daerah
		8.	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK)
		9.	Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Daerah
KEEMPAT	Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan Berkelanjutan	10.	Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya Air dan lahan
		11.	Mewujudkan Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup
KELIMA	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Responsif Gender	12.	Mewujudkan Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik
		13.	Mewujudkan Peningkatan jaminan Kapasitas dan Perlindungan Hukum
		14.	Mewujudkan Peningkatan Kesetaraan Gender
KEENAM	Meningkatkan Pelayanan Publik	15.	Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik

2.1.2.2. Sasaran Pembangunan Kabupaten Sarolangun

Sasaran yang dimaksud disini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isi-isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal, untuk menentukan factor kunci keberhasilan, sejalan dengan proses perencanaan strategis. Focus utama penentu sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber sumber daya kedalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan. Dalam penetapan sasaran juga juga dirancang dan diidentifikasi indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu. Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing.



Penetapan indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Sarolangun, baik yang bersifat makro maupun mikro, diharapkan dapat memberikan fokus pada penentu strategi dan prioritas dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dan program-program pilihan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan, visi dan misi Kabupaten Sarolangun.

Adapun sasaran strategis yang merupakan penjabaran dan tujuan secara terukur pada tahun 2018 sebagai ukuran kinerja utama Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022 dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 2.2
PENGELOMPOKAN TUJUAN DAN SASARAN

NO	TUJUAN	NO	SASARAN
1.	Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan	1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan
2.	Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur listrik	2.	Terwujudnya Infrastruktur Listrik yang Memadai
3.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih	3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih
4.	Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya	4.	Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya
5.	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Kualitas Tenaga Kerja	5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		6.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
		7.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi
6.	Mewujudkan Penguatan Nilai-nilai Agama dan Budaya Dalam Pembangunan	8.	Meningkatnya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat
7.	Meningkatkan Perekonomian Daerah	9.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi
		10.	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah
		11.	Menurunnya Angka Kemiskinan
		12.	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Daesa



NO	TUJUAN	NO	SASARAN
8.	Mewujudkan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK)	13.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan
9.	Mewujudkan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Daerah	14.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal
10.	Peningkatan Kualitas dan Kelestarian Sumber Daya Air dan lahan	15.	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan
11.	Mewujudkan Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup	16.	Mempertahankan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Perubahan Iklim
12.	Mewujudkan Peningkatan Tata Pemerintahan Yang Baik	17.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan yang Baik
		18.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas
13.	Mewujudkan Peningkatan jaminan Kapasitas dan Perlindungan Hukum	19.	Meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum
14.	Mewujudkan Peningkatan Kesetaraan Gender	20.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak
15.	Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik	21.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Adapun program-program yang mendukung sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam kurun waktu selama tahun 2018 Sebanyak 40 Program adalah sebagai berikut:

TABEL 2.3
PROGRAM YANG Mendukung SASARAN TAHUN 2018

NO	SASARAN	NO	PROGRAM
1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.	Program pembangunan jalan dan jembatan
		2.	Program pembangunan infrastruktur pedesaan
		3.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
2.	Terwujudnya Infrastruktur Listrik yang Memadai	4.	Program pembinaan dan pengawasan bidang energy dan sumber daya mineral



NO	SASARAN	NO	PROGRAM
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih	2.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan
		3.	Program pengemabangan pengelolaan air minum dan air limbah
4.	Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya	1.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
		2.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1.	Program pengembangan manajemen pelayanan pendidikan
6.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1.	Program pelayanan kesehatan primer
7.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi	1.	Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
8.	Meningaktanya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat	1.	Program peningkatan dan pengembangan nilai keagamaan
		2.	Program pengembangan nilai budaya
9.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	1.	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi
		2.	Program pengembangan industri kecil dan menengah
		3.	Program pengembangan sentra-sentra industry potensial
10.	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah	1.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
11.	Menurunnya Angka Kemiskinan	1.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
		2.	Program peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan
12.	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Daesa	1.	Program pengembangan usaha masyarakat desa



NO	SASARAN	NO	PROGRAM
13.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan	1.	Program monitoring evaluasi dan pelaporan ADD dan P2DK
14.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal	1.	Program pengembangan budidaya perikanan
		2.	Program peningkatan hasil produksi peternakan
		3.	Program pengembangan tanaman pangan
		4.	Program pengembangan holtikultura
15.	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	1.	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
16.	Mempertahankan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Perubahan Iklim	1.	Program perlindungan dan konservasi SDA
		2.	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan lingkungan hidup
17.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan yang Baik	1.	Program peningkatan dan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
		2.	Program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
18.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	1.	Program perencanaan pembangunan daerah
		2.	Program perencanaan pembangunan ekonomi
		3.	Program kerjasama pembangunan
		4.	Program perencanaan sosial budaya
19.	Meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum	1.	Program penataan peraturan perundangan-undangan
20.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	1.	program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
		2.	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
		3.	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan dan gender dan anak
21.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1.	Program standarisasi pelayanan publik
		2.	Program standarisasi pelayanan kesehatan



2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja, maka untuk tahun 2018 pelaporan kinerja telah diperbaiki dengan terbitnya perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan ditindaklanjuti dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja sebagai perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk mencapai tujuan strategis telah menerapkan tata laksana dengan baik meliputi 21 (Dua puluh satu) sasaran strategis. Perencanaan Kinerja yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun 2018 dan kemudian ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada tahun bersangkutan. Oleh karena itu, Perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Dokumen perjanjian kinerja memuat sasaran strategis berupa terwujudnya penyelenggaraan tata laksana pemerintah yang efisien, efektif dan akuntabel yang diukur dengan 36 (Tiga puluh Enam) indikator kinerja sebagai berikut :



TABEL 2.4
PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	INSTANSI
1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	1.	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	71	PUPR
2.	Terwujudnya Infrastruktur Listrik yang Memadai	2.	Rasio Desa Berlistrik	%	89	ESDA
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih	3.	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	30	PUPR
		4.	Akses Terhadap Air Minum Layak	%	67	
4.	Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya	5.	Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD	%	24	DISDIKBUD
		6.	Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP	%	25	
		7.	Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Per 30.000 Penduduk	%	18.453	DINKES
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	9.	Persentase SD yang Terakreditasi	%	92	DISDIKBUD
		10.	Persentase SMP yang Terakreditasi	%	86	



NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	INSTANSI	
6.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	11.	Angka Harapan Hidup	Tahun	68.83	DINKES	
		12.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	3.7		
		13.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	82.5		
		14.	Prevelence Balita Gizi Buruk	0.10%	0.10		
		15.	Contraceptive Prevalence Rate	%	68		DP2KB
		16.	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	40		DINKES
7.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi	17.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70.72	DISNAKERTRANS	
		18.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.51		
8.	Meningaktanya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat	19.	Persentase Buta Aksara Al-Quran	%	15	BINA KESRA	
9.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	20.	Pertumbuhan Ekonomi	%	4.57	BPS	
10.	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah	21.	Indeks Gini	%	0.336	BPS	
11.	Menurunnya Angka Kemiskinan	22.	Persentase Penduduk Miskin	%	9.08	BPS	
12.	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Daesa	23.	Indeks Desa Membangun (IDM)	%	40,27	DPMD	



NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	INSTANSI
13.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan	24.	Pengeluaran Perkapita	%	767.52	BPS
14.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal	25.	Persentase Tercukupinya Pangan Pada Tingkat Rumah Tangga Dalam Jumlah, Mutu, Ragam, Keamanan Serta Keterjangkauan Harga	%	66	DKP
15.	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	26.	Tingkat Pencemaran Lingkungan	Peringkat	Sedang	DLH
16.	Mempertahankan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Perubahan Iklim	27.	Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen	Tidak	
17.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan yang Baik	28.	Predikat Sakip	Peringkat	CC	BAGIAN ORGANISASI INSPEKTORAT BAPPEDA
18.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	29. 30.	Opi ni BPK Terhadap Tingkat Keselarasan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Diatasnya	Peringkat %	WTP 86.04	
19.	Meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum	31.	Persentase Penyelesaian Perda	%	85	BAGIAN HUKUM
20.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	32.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	66.67	BPS
		33.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	60.83	BPS
		34.	Indeks Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	%	41.02	DP3A
21.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	35.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan	Nilai	80.20	DPMPSTP
		36.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Nilai	75.80	DINKES
		37.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kependudukan	Nilai	76.50	DUKCAPIL



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari pengguna sumber daya organisasi oleh penerima amanah kepada pemberi amanah secara transparan dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi yang mewujudkan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Kabupaten Sarolangun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD 2017-2022. Pengukuran Indikator Kinerja Utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-



masing indikator kinerja utama. Skala pengukuran dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut :

TABEL 3.1
SKALA PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN LKJ 2018

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1.	85% s.d 100%	Sangat Baik
2.	70% s.d < 85%	Baik
3.	55% s.d 70%	Cukup
4.	< 55 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), dan hasil (*outcomes*).

Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Tujuan pembangunan Kabupaten Sarolangun ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan



Kabupaten Sarolangun telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri.

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, diperlukan adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun urusan terkait aspek daya saing daerah. Adapun uraian target dan Realisasi Pengukuran Pencapaian Sasaran Kinerja Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini :





TABEL 3.2
PENGUKURAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	71	72,15	101,62
2.	Terwujudnya Infrastruktur Listrik yang Memadai	Rasio Desa Berlistrik	%	89	95,97	107,84
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	30	37,93	126,44
		Akses Terhadap Air Minum Layak	%	67	53,34	79,61
4.	Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya	Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD	%	24	21	87,50
		Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP	%	25	23	92,00
		Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Per 30.000 Penduduk	%	18.453	19.585	93,87
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase SD yang Terakreditasi	%	92	91,73	99,71
		Persentase SMP yang Terakreditasi	%	86	85,07	103,95



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,83	68,83	100
		Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	3,7	3,4	108,82
		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	82,5	64,05	128,82
		Prevelensce Balita Gizi Buruk	0.10%	0,10	0,07	142,86
		Contraceptive Prevalence Rate	%	68	72,72	118,13
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	40	68,75	171,88
7.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,72	70,08	99,10
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,51	2,25	150,11
8.	Meningaktanya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Buta Aksara Al-Quran	%	15	14,28	95,2
9.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,57	4,69	102,62
10.	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah	Indeks Gini	%	0,336	0,290	115,86
11.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	9,08	8,87	102,31



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
12.	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Daesa	Indeks Desa Membangun (IDM)	%	40,27	33,55	83,34
13.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan	Pengeluaran Perkapita	%	767,52	961,27	125,24
14.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Tercukupinya Pangan Pada Tingkat Rumah Tangga Dalam Jumlah, Mutu, Ragam, Keamanan Serta Keterjangkauan Harga	%	66	82,30	124,70
15.	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Tingkat Pencemaran Lingkungan	Peringkat	Sedang	Ringan	200
16.	Mempertahankan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Perubahan Iklim	Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen	Tidak	Ada	200
17.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan yang Baik	Predikat Sakip	Peringkat	CC	B	200
		Opini BPK Terhadap	Peringkat	WTP	WTP	100
18.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Tingkat Keselarasan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Diatasnya	%	86,04	90,7	105,42
19.	Meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum	Persentase Penyelesaian Perda	%	85	40	47,06



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
20.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	66,67	90,44	135,65
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	60,83	80,4	95,92
		Indeks Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	%	41,02	100	243,78
21.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan	Nilai	80,20	83,66	104,31
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Nilai	75,80	77,84	102,69
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kependudukan	Nilai	76,5	76,54	100,05



TABEL 3.3
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 1
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	%	71	72,15	101,15

(Sumber data Dinas PUPR Kab. Sarolangun)

3.1.1 *Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik*

Ketersediaan infrastruktur pelayanan umum merupakan unsur penunjang utama dalam mendukung terciptanya akselerasi pembangunan Kabupaten Sarolangun yang berkesinambungan. Ketersediaan infrastruktur akan mempengaruhi secara langsung kondisi sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketersediaan infrastruktur menjadi katalisator pencapaian pembangunan pada bidang. Dalam pelaksanaannya, pembangunan infrastruktur tersebut harus bertumpu pada pengembangan dan optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.

Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

Sasaran strategis ini mencakup indikator Persentase Jalan dan Jembatan keseluruhan dalam kondisi baik. Tingkat capaian kinerja indikator Persentase Panjang Jalan dan Jembatan keseluruhan dalam kondisi baik sepanjang 842,61 km atau sebesar sebesar 72,15 %. Untuk lebih jelasnya pencapaian IKU tersebut diuraikan di bawah ini:



Dalam peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur jalan dan jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun dengan pekerjaan pembangunan sebanyak 53 (lima puluh tiga) Pembangunan jalan, yang terdiri dari Pembukaan jalan sebanyak 9 (sembilan) jalan, Peningkatan jalan, dan Peningkatan jalan DAK (DAK Fisik Reguler Pendukung Konektivitas) sebanyak 44 (empat puluh empat) jalandalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalanserta realisasi fisik sebesar 100%, terdapatnya jalan dalam kondisi baik akan dapat memberikan potensial adanya peningkatan perekonomian masyarakat.

Pada Tahun 2018 penangan jalan di Kabupaten Sarolangun dilakukan pada 10 kecamatan yaitu : Kecamatan Sarolangun, Kecamatan Bathin VIII, Kecamatan Pelawan, Kecamatan Singkut, Kecamatan Pauh, Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Mandiangin, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kecamatan Limun, dan Kecamatan Batang Asai, Adapun jenis penanganannya sebagai berikut :

- ✓ **Pembukaan Jalan Baru** sepanjang **9,751 km** dengan rincian Kecamatan Cermin Nan Gedang sepanjang 2 km, Kecamatan Singkut sepanjang 0,473 km, Kecamatan Sarolangun sepanjang 0,438 km, Kecamatan Bathin VIII sepanjang 4 km, Kecamatan Pauh sepanjang 2,1 km, dan Kecamatan Mandiangin sepanjang 0,740 km.
- ✓ **Pengaspalan Jalan** sepanjang **33,779 km** dengan rincian Kecamatan Cermin Nan Gedang sepanjang 1,192 km, Kecamatan Singkut sepanjang 6,073 km, Kecamatan Sarolangun sepanjang 10,370 km, Kecamatan Bathin VIII sepanjang 1,100 km, Kecamatan Pauh sepanjang 3,970 km, Kecamatan Air Hitam sepanjang 2,869 km, dan Kecamatan Mandiangin sepanjang 8,205 km.
- ✓ **Rigid beton** sepanjang **3,065 km** dengan rincian Kecamatan Batang Asai sepanjang 1,265 km, Kecamatan Cermin Nan Gedang sepanjang 0,460 km, Kecamatan Sarolangun



sepanjang 0,142 km, Kecamatan Bathin VIII sepanjang 0,448 km, Kecamatan Pauh sepanjang 0,500 km, dan Kecamatan Air Hitam sepanjang 0,250 km.

- ✓ **Perkerasan Jalan**sepanjang **37,715 km** dengan rincian Kecamatan Batang Asai sepanjang 2,600 km, Kecamatan Limun sepanjang 3,050 km, Kecamatan Cermin Nan Gedang sepanjang 3,637 km, Kecamatan Pelawan sepanjang 9,684 km, Kecamatan Singkut sepanjang 7,045 km, Kecamatan Sarolangun sepanjang 3,874 km, Kecamatan Bathin VIII sepanjang 3,500 km, dan Kecamatan Mandiangin sepanjang 4,325 km.

Terhadap penanganan jalan per kecamatan sebanyak 10 kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun, dari panjangjalansepanjang 1.167,82 kmtertangani sepanjang 842,61 km atau meningkat sebesar 1,15% dari tahun sebelumnya yaitu jalan dalam kondisi baik sepanjang 830,24 km,dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Sarolangun sepanjang 154,32 km dengan kondisi baik sepanjang 140,33 km (90,93%), kondisi sedang sepanjang 11,67 km (7,56%), kondisi rusak ringan sepanjang 1,50 km (0,97%), dan kondisi rusak berat sepanjang 0,83 km (0,53%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Bathin VIII sepanjang 88,97 km dengan kondisi baik sepanjang 64,95 km (73%), kondisi sedang sepanjang 8,35 km (9,39%), kondisi rusak ringan sepanjang 5,23 km (5,87%), dan kondisi rusak berat sepanjang 10,45 km (11,75%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Pelawan sepanjang 84,50 km dengan kondisi baik sepanjang 54,55 km (64,56%), kondisi sedang sepanjang 10,80 km (12,78%), kondisi rusak ringan sepanjang 8,55 km (10,12%), dan kondisi rusak berat sepanjang 10,60 km (12,55%).



- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Singkut sepanjang 132,39 km dengan kondisi baik sepanjang 96,33 km (72,77%), kondisi sedang sepanjang 19,28 km (14,56%), kondisi rusak ringan sepanjang 8,06 km (6,09%), dan kondisi rusak berat sepanjang 8,70 km (6,57%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Pauh sepanjang 119,87 km dengan kondisi baik sepanjang 63,20 km (52,73%), kondisi sedang sepanjang 10,92 km (9,11%), kondisi rusak ringan sepanjang 17,08 km (14,25%), dan kondisi rusak berat sepanjang 28,66 km (23,91%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Air Hitam sepanjang 54,87 km dengan kondisi baik sepanjang 34,27 km (62,45%), kondisi sedang sepanjang 3,45 km (6,29%), kondisi rusak ringan sepanjang 8,30 km (15,13%), dan kondisi rusak berat sepanjang 8,85 km (16,13%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Mandiangin sepanjang 134,77 km dengan kondisi baik sepanjang 114,35 km (84,85%), kondisi sedang sepanjang 9,28 km (6,88%), kondisi rusak ringan sepanjang 4,84 km (3,59%), dan kondisi rusak berat sepanjang 6,31 km (4,68%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Cermin Nan Gedang sepanjang 86,60 km dengan kondisi baik sepanjang 52,56 km (60,69%), kondisi sedang sepanjang 4,42 km (5,10%), kondisi rusak ringan sepanjang 11,61 km (13,41%), dan kondisi rusak berat sepanjang 18,01 km (20,80%).
- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Limun sepanjang 160,32 km dengan kondisi baik sepanjang 108,52 km (67,69%), kondisi sedang sepanjang 30,10 km (18,77%), kondisi rusak ringan sepanjang 9,75 km (6,08%), dan kondisi rusak berat sepanjang 11,95 km (7,45%).



- ✓ Panjang Jalan di Kecamatan Batang Asai sepanjang 151,21 km dengan kondisi baik sepanjang 113,55 km (75,10%), kondisi sedang sepanjang 18,25 km (12,07%), kondisi rusak ringan sepanjang 7,78 km (5,15%), dan kondisi rusak berat sepanjang 11,63 km (7,69%).

Tercapainya target realisasi sebesar 72,15% terhadap target yang telah ditentukan sebesar 71% merupakan suatu prestasi yang membanggakan, hal ini dikarenakan dari panjang jalan Kabupaten Sarolangun sepanjang 1.167,82 km yang terakomodir dalam renja SKPD sebesar 842,61 km dalam kondisi baik dengan rumusan

$$\text{capaian} = \frac{\text{Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik (842,61)}}{\text{Jumlah Panjang Seluruh Jalan Kabupaten (1.167,82)}} \times 100\% = 72,15\%$$

TABEL 3.4
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 2
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
2.	Terwujudnya Infrastruktur Listrik yang Memadai	Rasio Desa Berlistrik	%	89	95,97	107,84

(sumber data bagian ESDA Kab. Sarolangun)

3.1.2. Rasio Desa Berlistrik

Dapat kita lihat dari tabel diatas bahwasanya dimana pemerintah kabupaten sarolangun menargetkan 89 % untuk memenuhi terwujudnya infrastruktur listrik, dan untuk tahun 2018 ini mencapai realisasi 95,97% , dengan capaian 107,84%. Disini artinya kabupaten sarolangun sukses dalam mengerjakan sasaran strategis yang telah ditetapkan didalam dokumen RPJMD. dan sifat indikator ini memang sangat berperan penting didalam kehidupan masyarakat banyak karna semakin tingginya realisasi yg terwujud



maka akan menjadi salah satu tolak ukur kemajuan suatu kabupaten, baik dari bidang pertumbuhan ekonomi yang ada di kabupaten sarolangun.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM nomor 38 tahun 2016 tentang percepatan elektrifikasi dipedesaan belum berkembang. Terpencil, perbatasan dan pulau kecil berpenduduk melalui pelaksanaan tenaga listrik skala kecil.

Disini dapat kita lihat penyebab keberhasilan pemerintah kabupaten sarolangun dalam menerpakan sasaran terwujudnya infrastruktur listrik yang memadai, dimana kabupaten sarolangun mendapatkan alokasi anggaran melalui program listrik desa dari PT. PLN (persero) jambi, dimana tahun 2018 melalui program listrik desa kabupaten sarolangun sudah teraliri arus listrik sebanyak 12 desa, diantaranya sebagai berikut :

1. Desa lubuk bedorong
2. Desa temalang
3. Desa maribung
4. Desa napal melintang
5. Desa berkun
6. Desa mersip
7. Desa sepintun
8. Desa taman bandung
9. Desa suka damai
10. Desa lamban segatal
11. Desa Lubuk napal dan,
12. Desa seko besar



Untuk tahun 2018, dengan jumlah desa sebanyak 149, yang sudah teraliri listrik sebanyak 137 desa dengan jenis pembangkit PLN dan 6 desa dengan jenis PLMTH,



Artinya sudah 143 desa yang teraliri listrik. Dan 6 desa lagi yang belum teraliri listrik, mudah-mudahan dalam 4 tahun kedepan seluruh desa yang ada di Kabupaten Sarolangun telah teraliri listrik keseluruhan desa. Desa yang belum teraliri listrik adalah sebagai berikut :

1. Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai
2. Desa Kasiro Ilir Kecamatan Batang Asai
3. Desa Datuk Nan Duo Kecamatan Batang Asai
4. Desa Muara Air Dua Kecamatan Batang Asai
5. Desa Batu Empang Kecamatan Batang Asai
6. Desa Muara Pemuat Kecamatan Batang Asai

TABEL 3.5
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 3
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Irigasi dan Air Bersih	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	30	37,93	126,43
		Akses Terhadap Air Minum Layak	%	67	53,34	76,94

(Sumber data Dinas PUPR Kab. Sarolangun)

Sasaran : Meningkatkan kualitas dan ketersediaan Jaringan Irigasi dan air bersih

Sasaran strategis ini mencakup indikator Persentase Panjang DI/Jaringan Irigasi kondisi baik, dan Persentase akses air minum layak. Persentase Panjang DI/Jaringan Irigasi kondisi baik sebesar 37,93%, dan Persentase akses air minum layak sebesar 21,26



%. Untuk lebih jelasnya, masing-masing pencapaian IKU tersebut diuraikan di bawah ini:

3.1.3. *Persentase Panjang DI/Jaringan Irigasi Kondisi Baik*

Jaringan Irigasi adalah salah satu infrastruktur yang merupakan bagian utama dalam upaya peningkatan Ketahanan Pangan. Di dalam upaya peningkatan kinerja, sasaran 2 (dua) didukung oleh 2 indikator kinerja yaitu Persentase Panjang DI/Jaringan Irigasi Kondisi Baik (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/dipelihara) dan Persentase akses air minum layak.

Untuk mendukung sasaran 2, maka Ditjen Sumber Daya Air berupaya untuk membangun/meningkatkan serta melakukan pemeliharaan dan pengoperasian pelayanan irigasi dan rawa di beberapa tempat. Dengan infrastruktur jaringan irigasi yang handal, maka akan mudah suplai kebutuhan air bagi para petani, sehingga hasil panen akan meningkat. Sementara itu, peningkatan/pemeliharaan jaringan rawa dilakukan untuk meningkatkan fungsi dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat terutama dalam peningkatan produksi pangan serta mempercepat pembangunan daerah.

Tercapainya target di atas terhadap target yang telah ditentukan merupakan suatu prestasi yang membanggakan. Dari total kewenangan Daerah Irigasi Kabupaten yaitu seluas 7.962 Ha dengan 139 lokasi Daerah Irigasi dapat memberikan potensial adanya peningkatan produksi padi.

Pada Tahun 2018 Daerah Irigasi yang terbangun sebanyak 11 Daerah Irigasi, dengan total 517 Ha yang terdiri dari pembangunan irigasi 4 (empat) Daerah Irigasi di



kecamatan Batang Asai dengan luas 247 Hadengan totalpanjang saluran terbangun sepanjang 1.960 meterantara lain :

- ✓ Rehabilitasi dan Peningkatan DI. Sei Manggus Desa Kalimau Ulu Kecamatan Batang Asai yaitu Pembangunan DAM 1 bh dan Saluran .P. 350 m', Talang Pipa 100 m'.
- ✓ Rehabilitasi dan Peningkatan Irigasi DI. Sei Batang Keradak Desa Sei Keradak Kecamatan Batang Asai yaitu Rehab dan Peningkatan Saluran .P. 550 m' dan Pasangan Bronjong Tebing Saluran P. 60 m'
- ✓ Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Batin Pengambang Kecamatan Batang Asai (Lanjutan) yaitu Rehab dan Pembangunan Saluran .P. 710 m'.
- ✓ Rehabilitasi dan Peningkatan Irigasi DI. Pulau Langsung Desa Tambak Ratu Kecamatan Batang Asai yaitu Pembangunan Saluran .P. 250 m' dan 1 unit Plat Dueker dan Pasangan Bronjong Tebing Saluran P. 30 m'

DAK Infrastruktur Irigasi 7 (tujuh) Daerah Irigasi dengan luas 270 Hadengan totalpanjang saluran yang terbangun sepanjang 3.210 meter antara lain:

a. Kecamatan Batang Asai :

- ✓ Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei Bawah Buluh Desa Datuk Nan Duo Kecamatan Batang Asai yaitu Rehab. Bendungan 1 bh dan Saluran .P. 550 m'.
- ✓ Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei menturun Desa rantau Panjang Kecamatan Batang Asai yaitu Pembangunan Bendungan 1 bh dan Saluran .P. 450 m'.

b. Kecamatan Air Hitam :

- ✓ Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei Jernih Desa Jernih Kecamatan Air Hitam yaitu Pembangunan Saluran .P. 650 m'.
- ✓ Peningkatan Irigasi DI. Sei Anak Paku Aji Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam yaitu Pembangunan Saluran .P. 350 m'.



- ✓ Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Punt Kayu Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitanyaitu Pembangunan Saluran .P. 410 m'

c. Kecamatan Pelawan yaitu Desa Pasar Pelawan :

- ✓ Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei Renah Desa Pasar Pelawan Kec. Pelawan (Lanjutan) yaitu Pembangunan tanggul p. 200 m' Saluran .P. 250 m'.
- ✓ Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Sei Batang Pangi Kec. Limun (Lanjutan) yaitu Pembangunan Saluran .P. 550 m''

Pada Tahun 2018 telah dibangun 2 buah bendungan baru dengan panjang bentang masing-masing 5 meter dan 1 buah rehab bendungan dengan bentang 12 meter serta pembangunan dan peningkatan saluran irigasi dengan total panjang saluran 5.170m' dan terealisasi kegiatan/fisik sebesar 100%. Tercapainya target realisasi sebesar 37,93% terhadap target yang telah ditentukan sebesar 30% merupakan suatu prestasi yang membanggakan, hal ini dikarenakan dari luas hektar irigasi di Kabupaten Sarolangun seluas 7.962 Ha yang terakomodir dalam renja SKPD seluas 2.503 Ha pada Tahun 2017 dan 517 Ha pada Tahun 2018 dalam kondisi baik dengan rumusan capaian :

$$\frac{\text{Panjang Irigasi Dalam Kondisi Baik (3.020 Ha)}}{\text{Luas Irigasi Kabupaten (7.962 Ha)}} \times 100\% = 37,93\%$$

3.1.4. Akses Air Minum Layak

Untuk meningkatkan jumlah layanan air minum dilakukan melalui pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM). Pembangunan sistem penyediaan air minum/Air Bersih sepanjang tahun 2018 sebanyak 26 unit dengan persentase sebesar 53,34% dalam kondisi baik dengan rumusan capaian :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Terlayani (76314)}}{\text{Jumlah Penduduk Wilayah Pelayanan (143053)}} \times 100\% = 53,34\%$$

"LKJ PEMERINTAH KAB.SAROLANGUN 2018"



- Kurangnya data tentang jumlah penduduk yang masih belum mendapatkan akses air minum layak.
- Tidak terakomodirnya seluruh kegiatan yang diusulkan baik melalui APBD Provinsi maupun APBN terhadap usulan kegiatan.

TABEL 3.6
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 4
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.	Meningkatnya Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Lainnya	Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD	%	24	21	87,5
		Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP	%	25	23	92,00
		Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Per 30.000 Penduduk	%	18.453	19.585	94,22

(Sumber data DISDIKBUD, DINKES Kab. Sarolangun)

Capaian dari rasio ruang kelas baik terhadap siswa SD dan SMP, APM SD/MI dan APM SMP/MTs, APK SD/MI dan APK SMP/MTS sebagai berikut :

- Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD dari target 24 % dapat terealisasi sebesar 21 %.
- Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP dari target 25 % dapat terealisasi sebesar 23 %.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dari target 95,64 % dapat terealisasi sebesar 97,66 %.
- Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs dari target 78,35 % dapat terealisasi sebesar 83,07 %.



- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dari target 104,01 % dapat terealisasi sebesar 106,53 %.
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs dari target 90,11 % dapat terealisasi sebesar 92,35 %.
- Guru yang Bersertifikat Pendidik dari target 73,18 % dapat terealisasi sebesar 72,89 %.
- Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV Ke Atas dari target 72,92 % dapat terealisasi sebesar 75,72 %.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari target 8,45 tahun dapat terealisasi menjadi 9,01 tahun.
- SD yang Terakreditasi dari target 92,00 % dapat terealisasi sebesar 91,73 %.
- SMP yang Terakreditasi dari target 86,00 % dapat terealisasi sebesar 89,40 %.
- Jumlah Siswa/mahasiswa yang berprestasi/tidak mampu yang mendapat beasiswa dari target 55 Orang dapat terealisasi menjadi 47 Orang.
- Persentase Pelestarian Situs dan Cagar Budaya dari target 15 % dapat terealisasi sebesar 17,5 %.
- Persentase Pelestarian Seni dan Budaya dari target 20 % dapat terealisasi sebesar 25 %.

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, maka dapat diketahui pencapaian kinerja pada tahun 2018 yang lalu, terdapat 10 indikatornya mengalami peningkatan dan 1 indikator lainnya mengalami penurunan.

- Untuk Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD mempunyai target 24 % yang terealisasi sebesar 21 % meningkat dari realisasi tahun lalu 23 %.
- Untuk Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP mempunyai target 25 % yang terealisasi sebesar 23 % meningkat dari realisasi tahun lalu 24 %.



- Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI mempunyai target 95,64 % yang terealisasi sebesar 97,66 % meningkat dari realisasi tahun lalu 97,11 %.
- Untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs mempunyai target 78,35 % yang terealisasi sebesar 83,07 % meningkat dari realisasi tahun lalu 80,01 %.
- Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI dari target 104,01 % dapat terealisasi sebesar 106,53 % meningkat dari realisasi tahun lalu 104,98 %.
- Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs mempunyai target 90,11 % yang terealisasi sebesar 92,35 % meningkat dari realisasi tahun lalu 90,65 %.
- Guru yang Bersertifikat Pendidik dari target 73,18 % dapat terealisasi sebesar 72,89 % meningkat dari realisasi tahun lalu 70,24 %.
- Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV dari target 72,92 % dapat terealisasi sebesar 75,72 % meningkat dari realisasi tahun lalu 73,87 %.
- Untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mempunyai target 8,45 tahun yang terealisasi sebesar 9,01 tahun meningkat dari realisasi tahun lalu 8,98 tahun.
- SD yang Terakreditasi dari target 92,00 % dapat terealisasi sebesar 91,73 % meningkat dari realisasi tahun lalu 87,23 %.
- SMP yang Terakreditasi dari target 86,00 % dapat terealisasi sebesar 89,40 % meningkat dari realisasi tahun lalu 83,08 %.
- Jumlah Siswa/mahasiswa yang berprestasi/tidak mampu yang mendapat beasiswa dari target 55 Orang dapat terealisasi sebesar 47 Orang meningkat dari realisasi tahun lalu 42 Orang.
- Persentase Pelestarian Situs dan Cagar Budaya dari target 15 % dapat terealisasi sebesar 17,5 % meningkat dari realisasi tahun lalu N/A.



- Persentase Pelestarian Seni dan Budaya dan Cagar Budaya dari target 20 % dapat terealisasi sebesar 25 % meningkat dari realisasi tahun lalu N/A.
- Realisasi kinerja pada tahun pertama indikator kinerja mempunyai angka Lebih besar dengan realisasi kinerja yang terdapat di tahun terakhir pada tahun 2018, Semua indikator kinerja mempunyai angka Lebih besar daripada realisasi kinerja yang terdapat di jangka terakhir periode terakhir (2017-2022).

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan/ peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

3.1.5. Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD

- Dengan banyaknya pembangunan infrastruktur sekolah baik dari Pusat maupun pemda maka Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD dapat tercapai, walaupun masih terdapat kekurangan seperti kurang meratanya sebaran siswa yang sekolah pada daerah daerah tertentu, sehingga apabila dilihat di lapangan masih terdapat sekolah yang Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SD masih di atas 24 siswa perkelas, dimana kebanyakan berada di sekolah sekolah yang terdapat di Kota.

3.1.6. Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP

- Dengan banyaknya pembangunan infrastruktur sekolah baik dari Pusat maupun pemda maka Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP dapat tercapai, walaupun masih terdapat kekurangan seperti kurang meratanya sebaran siswa yang sekolah pada daerah daerah tertentu, sehingga apabila dilihat di lapangan masih terdapat sekolah yang Rasio Ruang Kelas Terhadap Siswa SMP masih di atas 25 siswa perkelas, dimana kebanyakan berada di sekolah sekolah yang terdapat di Kota.
- Angka Melek Huruf



- Dengan program pemberantasan Buta Aksara yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun telah mampu menurunkan jumlah buta aksara atau dengan kata lain dapat meningkatkan jumlah penduduk melek huruf.
- Angka rata-rata lama Sekolah
- Dengan peningkatan jumlah siswa/ mahasiswa dan tamatan mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA dan Perguruan Tinggi setiap tahunnya, maka secara langsung akan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah, dan angka ini mengalami peningkatan dari 8,91 tahun menjadi 8,98 tahun.
- Angka Partisipasi Murni (APM)
Banyaknya siswa usia di bawah 7 tahun yang telah masuk SD/MI, namun siswa tersebut tidak masuk kedalam perhitungan APM, meskipun pada kenyataannya jumlah siswa meningkat.
- Banyaknya siswa usia di bawah 13 tahun yang telah masuk SMP/MTs, namun siswa tersebut tidak masuk kedalam perhitungan APM, meskipun pada kenyataannya jumlah siswa meningkat.
- Angka Partisipasi Kasar (APK)
- Jumlah siswa setiap tahunnya mengalami peningkatan dan begitu juga dengan jumlah penduduk, namun peningkatan jumlah siswa sekolah merupakan data real sedangkan jumlah penduduk merupakan data estimasi yang mana data estimasi tersebut persentase penambahan penduduk lebih besar dibandingkan persentase kenaikan jumlah siswa.
- Guru yang Bersertifikat Pendidik
- Semakin banyak nya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat pendidik, membuat guru yang mengikuti seleksi menjadi sulit untuk mendapatkan sertifikat



pendidik sehingga membuat capaian yang didapat tidak meningkat secara drastis, walaupun angka yang ada menunjukkan peningkatan.

Upaya dan Strategi yang dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan tersebut adalah Perlu adanya update data masyarakat secara berkala setiap setahun sekali agar data rata-rata lama sekolah bias lebih akurat. Meningkatkan kesadaran kepada orang tua agar menyekolahkan anaknya sesuai dengan usia sekolah. Meningkatkan kualitas sekolah di daerahnya agar membuat siswa menjadi berkeinginan untuk melanjutkan sekolah di daerahnya masing-masing.

3.1.7. Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk per 30.000 Penduduk

Pada sasaran ini dapat dilihat dari indikator ketiga yaitu *rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk per 30.000 penduduk*, ditargetkan 18.453 dan realisasinya belum mencapai target yaitu 19.585. Belum tercapainya target ini dikarenakan mengacu kepada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 bahwa persyaratan pembangunan puskesmas disebutkan pada pasal 9 ayat 1 dan 2, puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan dan dalam kondisi tertentu pada satu kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 puskesmas. Saat ini Kabupaten Sarolangun terdiri dari 10 kecamatan, 6 kecamatan memiliki 2 gedung puskesmas dan 4 kecamatan lainnya sudah memiliki 1 gedung puskesmas artinya tidak ada lagi kecamatan yang belum memiliki gedung puskesmas, oleh karena itu belum layak untuk dibangun gedung puskesmas yang baru, selain itu juga dari 4 kecamatan yang memiliki 1 gedung puskesmas jumlah penduduk masih relative sedikit belum mencapai minimal 30.000 jiwa sehingga belum layak untuk ditambah gedung puskesmas yang baru.



TABEL 3.7
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 5
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
5.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Persentase SD yang Terakreditasi	%	92	91,73	99,71
		Persentase SMP yang Terakreditasi	%	86	89,40	103,95

(sumber data DISDIKBUD Kab. Sarolangun)

3.1.8. *Persentase SD Yang Terakreditasi*

Dari table diatas dapat kita lihat dimana persentase SD yang terakreditasi pada dokumen perencanaan RPJMD dengan 92 % dapat terealisasi sebesar 91,73 % atau dengan capaian 99,71 %.

3.1.9. *Persentase SMP Yang Terakreditasi*

Kemudian dari target persentase SMP 86% terealisasi sebesar 89,71 % dengan capaian 103,95 %. Artinya kualitas pendidikan cukup baik pada saat ini ini karenan Dengan gencarnya pelaksanaan Akreditasi Sekolah baik dari Pusat dan dari daerah membuat capaian Sekolah yang Terakreditasi semakin meningkat, hal ini sesuai dengan program pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas Pendidikan melalui akreditasi yang telah dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas Pendidikan khususnya di daerah kabupaten Sarolangun.

TABEL 3.8
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 6
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
6.	Meningkatnya Kualitas	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,83	68,83	100



	Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	3,7	3,4	108,82
		Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	82,5	64,05	122,36
		Prevelence Balita Gizi Buruk	0.10%	0,10	0,07	130
		Contraceptive Prevalence Rate	%	68	72,72	106
		Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	40	68,75	171,88

(sumber data DINKES Dan DISP2KB)

3.1.10. Angka Harapan Hidup

Pada sasaran diatas dapat kita uraikan analisis setiap Indikator. Indikator Angka harapan Hidup ditargetkan sebesar 68.83 dan terealisasi sebesar 68.83, data ini diperoleh dari Sarolangun Dalam Angka Tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Tercapainya target UHH di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Meningkatnya kemudahan masyarakat untuk menjangkau sarana pelayanan kesehatan. Kabupaten sarolangun memiliki 16 puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan, 51 puskesmas pembantu dan setiap desa memiliki poskesdes yang dilayani oleh bidan desa serta sarana puskesmas keliling yang rutin turun ke desa.
2. Menurunnya penyakit infeksi seperti TB, diare, malaria, DBD dan penyakit infeksi lainnya.
3. Menurunnya penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, diabetes dan penyakit lainnya.
4. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak yang ditandai dengan penurunan menekan angka kematian ibu, bayi dan balita.
5. Meningkatnya cakupan imunisasi bayi.



3.1.11. Angka Kematian Ibu

Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) sudah mencapai target yaitu 64.5 Kelahiran Hidup dari target 82.5 per 100000 Kelahiran Hidup. Untuk melihat risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan dan melahirkan sangat dipengaruhi oleh social ekonomi, keadaan kesehatan ibu selama kehamilan, ketersediaan sarana pelayanan kesehatan dan tingkat pendidikan ibu hamil dan keluarga. Perbandingan kasus kematian ibu di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.8.1 Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 – 2018

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2013	6
2.	2014	5
3.	2015	3
4.	2016	5
5.	2017	4
6.	2018	4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, 2018

Kasus kematian ibu bila dilihat dari tahun ke tahun mengalami penurunan, sedangkan tahun 2017 ke tahun 2018 jumlah kasus kematiannya sama, tidak mengalami peningkatan. Ada beberapa factor yang mendorong tercapainya target ini:

1. Kesadaran ibu untuk memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan mulai dari K1 sampai K4 sudah semakin meningkat yang ditandai dengan tingginya cakupan K4.
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas kesehatan.
3. Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan dan disiplin tenaga kesehatan khususnya bidan desa dalam menangani kawat darurat.



4. Meningkatnya cakupan masyarakat yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan Masyarakat khususnya masyarakat miskin selain itu juga dana Jampersal untuk masyarakat miskin yang belum memiliki Jaminan kesehatan.
5. Adanya kegiatan audit maternal perinatal yang rutin setiap tahun dilaksanakan untuk evaluasi dan pengambilan kebijakan untuk menurunkan angka kematian ibu.
6. Ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang sudah meningkat dan kemudahan masyarakat untuk mengakses sarana pelayanan kesehatan.

Adapun penyebab kematian ibu adalah sebagai berikut: 1 kasus dikarenakan gangguan metabolik emboli air ketuban, upaya yang telah dilakukan pasien dirujuk dari puskesmas Limbur Tembesi ke RSUD namun tidak terselamatkan setelah selesai melahirkan. 1 kasus perdarahan pada bumil yang sudah terpantau resti, namun proses persalinan dilakukan oleh bidan desa pada saat dirujuk ke puskesmas tidak terselamatkan. 1 kasus hipertensi pada bumil yang sudah terpantau resti, telah mendapatkan penanganan selama proses kehamilan namun meninggal sebelum proses persalinan dikarena hipertensi. 1 kasus di puskesmas air hitam sudah selesai proses persalinan, namun 1 hari setelah persalinan mengalami demam dan meninggal.

3.1.12. Angka Kematian Bayi

Indikator angka kematian bayi (AKB) sudah mencapai target yaitu 3.4 per 1000 Kelahiran Hidup dari target 3.7 per 1000 kelahiran hidup. Indikator Angka Kematian Bayi adalah untuk melihat gambaran tingkat permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan factor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal,



status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan dan social ekonomi.

Indikator angka kematian bayi (AKB) sudah mencapai target yaitu 3.4 per 1000 Kelahiran Hidup dari target 3.7 per 1000 kelahiran hidup tahun 2018, namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 terjadi peningkatan kasus kematian dari 2.97 menjadi 3.7 per 1000 kelahiran hidup. Adapun faktor peningkatan kasus kematian bayi adalah:

1. Belum adanya fasilitas NICU di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sarolangun yang diharapkan mampu memberikan perawatan bayi lahir dengan berat badan rendah dan bayi prematur.
2. Belum semua tenaga kesehatan terlatih dalam penanganan kasus komplikasi pada neonates.
3. Tidak semua bayi yang lahir BBLR dan premature terpantau oleh tenaga kesehatan.
4. Masih tingginya bumil KEK yang melahirkan anak BBLR dan prematur.
5. Tidak semua bayi BBLR dan bayi prematur diperbolehkan oleh orang tuanya untuk dirujuk ke fasilitas kesehatan.

Kecenderungan jumlah kasus Kematian Bayi pada enam tahun terakhir dari tahun 2013 – 2018 disajikan dalam gambar berikut ini.

Tabel 3.8.2 Jumlah Kematian bayi di Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 – 2018

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2013	24
2.	2014	28
3.	2015	21
4.	2016	24
5.	2017	18
6.	2018	21

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun, 2018



Dari 21 kasus kematian bayi, 19 kasus pada umur 0-28 hari dan 2 kasus pada bayi umur 29-11 bulan. Adapun penyebab kematian bayi adalah: 9 kasus kematian bayi akibat BBLR, 6 kasus aspeksia, 1 kasus kelainan jantung, 1 kasus konggenital, 2 kasus lain-lain dan 2 kasus demam tinggi.

Adapun solusi untuk menanggulangi masalah diatas adalah:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD kabupaten Sarolangun sehingga tersedia fasilitas NICU.
2. Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan komplikasi neonates melalui pelatihan dan pembinaan tenaga kesehatan.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perlunya perawatan intensif untuk bayi BBLR dan Prematur.
4. Sweeping bumil KEK
5. Penyediaan PMT bagi bumil.

3.1.13. Prevelensi Balita Gizi Buruk

Untuk indikator prevalensi balita gizi buruk sudah mencapai target yaitu 0,07% dari target 0.10% pada tahun 2018. Adapun faktor yang mendorong tercapainya indikator tersebut adalah:

1. Pelaksanaan surveilen gizi sudah berjalan dengan baik sehingga mampu mendata seluruh kasus gizi buruk dengan optimal, sehingga dapat dilakukan penanganan.
2. Balita gizi buruk tidak seluruhnya disebabkan oleh asupan makanan yang kurang namun karena menderita penyakit.
3. Meningkatnya kegiatan pemberian PMT pada balita dan ketersediaan PMT baik balita gizi kurang dan gizi buruk.



4. Meningkatnya promosi kesehatan tentang gizi kepada masyarakat.

Adapun kegiatan yang dilakukan untuk penanganan kasus balita gizi buruk adalah:

1. Pemberian makanan tambahan (PMT) dan PMT pemulihan.
2. Pemeriksaan kesehatan.
3. Pengobatan bila ada penyakit penyerta.
4. Rujukan ke fasilitas kesehatan.

3.1.14. *Persentase Puskesmas Terakreditasi*

Indikator Akreditasi Puskesmas, indikator ini sudah tercapai yaitu 68,75% dari target 40% yang artinya dari 16 puskesmas yang ada di Kabupaten Sarolangun 11 puskesmas sudah terakreditasi. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan puskesmas yang terakreditasi dari 5 menjadi 11 Puskesmas. Status akreditasi puskesmas berdasarkan hasil penilaian Tim Komisi Akreditasi Kementerian Kesehatan sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8.3 Status Akreditasi Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun sampai dengan tahun 2018

No.	Nama Puskesmas	Status Akreditasi	Jadwal Reakreditasi
1.	Puskesmas Pauh	Dasar	2019
2.	Puskesmas Sarolangun	Dasar	2020
3.	Puskesmas Singkut	Madya	2020
4.	Puskesmas Mandiangin	Dasar	2020
5.	Puskesmas Pematang Kabau	Madya	2020
6.	Puskesmas Pulau Pandan	Madya	2020
7.	Puskesmas Limbur Tembesi	Dasar	2020
8.	Puskesmas Batang Asai	Masya	2021
9.	Puskesmas Singkut V	Dasar	2021



10.	Puskesmas Butang Baru	Madya	2021
11.	Puskesmas Cermin Nan Gedang	Dasar	2021
12.	Puskesmas Air Hitam	Menunggu Hasil	
13.	Puskesmas Sungai Baung	Menunggu Hasil	
14.	Puskesmas Pelawan	Dinilai 2019	
15.	Puskesmas Mersip	Dinilai 2019	
16.	Puskesmas Sepintun	Belum registrasi	

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan pendampingan akreditasi terhadap 6 puskesmas, dan hasil penilaian tim surveyor ke enam puskesmas dinyatakan lulus akreditasi. Saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun memiliki SDM pendamping akreditasi sebanyak 10 orang yang dibagi kedalam 3 Tim.

3.1.15. Contraceptive Prevalence Rate

Indikator Contraceptive prevalence Rate (CPR) adalah Cakupan Sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (PA/PUS) dari target sebesar **68 %** dapat terealisasi sebesar **72.72 %**, Ketercapaian melebihi dari target yaitu adanya partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi dan berdasarkan jumlah pasangan usia subur sebanyak **52.644** orang terdapat jumlah peserta KB Aktif sebanyak **38.287** orang atau sebesar **72.72%**.

Faktor pendorong tercapainya target adalah Partisipasi masyarakat sudah cukup tinggi, selain pelayanan di KKB dan RSD dan KKB Swasta, Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun (DPPKB) Juga mengadakan Pelayanan KB Keliling dan Pelayanan dengan dinas instansi terkait seperti, IBI, TNI dan unsur masyarakat lainnya.



Contraceptive prevalence Rate (CPR) merupakan ukuran kependudukan yang berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi dan CPR dapat membantu penurunan tingkat kemiskinan dalam jangka panjang.

1. Tenaga fungsional PLKB yang masih terbatas, baik jumlah maupun SDMnya.
2. Keterbatasan anggaran, dalam pelaksanaan program
3. Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik
4. Kurang berfungsinya Institusi Masyarakat Pedesaan
5. Masih adanya wilayah di Kabupaten Sarolangun yang sulit dijangkau dan tertinggal
6. Menurunnya pasangan usia subur

Didalam kendala dan tantangan dalam IKU ini juga terdapat keberhasilan yang dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sarolangun

1. Meningkatnya jumlah Pasangan Usia Subur yang menggunakan Alat Kontrasepsi
 2. Meningkatnya jumlah rasio tenaga PLKB dalam menunjang kegiatan KB
 3. Meningkatkan pembinaan Institusi KB yang berada dilini lapangan seperti Pos Pembina KB Desa (PPKBD) dan sub PPKBD yang diharapkan dapat bertugas sebagai Pembina peserta KB
 4. Banyaknya penghargaan yang didapat oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sarolangun yang berkaitan dengan Program DPPKB.
- Analisis berdasarkan Keberhasilan

Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB baik Jalur Pemerintah maupun swasta. Tujuan Program ini adalah terlayani Pasangan Usia Subur



(PUS) dalam Keluarga Berencana sehingga terwujudnya Keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Sasaran dari tujuan ini adalah pelayanan KB yang berkualitas sehingga terciptanya Keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Dengan indicator sebagai berikut :

1. Tercapainya Pasangan usia subur menjadi peserta KB Aktif
 2. Terlaksananya pembinaan Kesertaan KB jalur Pemerintah
 3. Terwujudnya Kemandirian dan Pembinaan dan Kesertaan Ber-KB melalui Jalur swasta.
 4. Terwujudnya Kesertaan ber-KB Calcitas, Wilayah Khusus dan sasaran Khusus.
 5. Terwujudnya kualitas Kesehatan reproduksi
 6. Tersedianya Data dan Informasi Program KB yang berkualitas
 7. Tersedianya Teknologi Informasi dan Dokumentasi Program KB
 8. Terlaksananya Pengelolaan Pembangunan KB Kabupaten Sarolangun
 9. Tersedianya Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) terutama alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.
- Analisis hambatan/Kendala dan Permasalahan
1. Masih rendahnya pengetahuan kesadaran remaja adan pasangan usia subur (PUS) tentang keluarga Berencana.
 2. Belum Optimalnya pemanfaatan Kelompok-kelompok kegiatan untuk peningkatan, pembinaan dan Kemandirian peserta KB.
 3. Angka Kematian Bayi (AKB) 35/1000 kelahiran dan angka kematian ibu (AK) masih cukup tinggi.
 4. Kurang fungsinya Institusi Masyarakat Pendesaan (IMP)



5. Terbatasnya tenaga Penyuluh dilapangan (PLKB)
 6. Masih adanya wilayah di Kabupaten Sarolangun yang masih sulit di jangkau dan tertinggal
 7. Sarana dan Prasarana operasional pergerakan masyarakat yang kurang memadai
 8. Belum semua program dan kegiatan terintegrasi dengan baik
 9. Keterbatasan tenaga Profesional dan penguasaan Teknologi Informasi
 10. Metode Fasilitasi dan Mekanisme Pembinaan Kepada Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program KB masih kurang optimal.
- Langkah-langkah Antisipatif yang diambil
1. Meningkatnya Jumlah Tenaga Pengendaki Lapangan atau Pengawas PLKB (PPLKB) di tingkat Kecamatan dan Petugas Lapangan KB (PLKB) atau Penyuluh KB (PKB) di tingkat Kelurahan/desa yang merupakan ujung tombak program KB
 2. Meningkatkan rasio PLKB terhadap desa agar persebaran tenaga Lapangan Merata.
 3. Meningkatkan sinergitas Kebijakan dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan KB baik Kabupaten Maupun di Kecamatan sampai desa Kelurahan

TABEL 3.9
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 7
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
7.	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Sesuai Kompetensi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,72	70,08	99,10
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,51	2,25	150,11

(Suber data DISNAKERTRAN, BPS Kab. Sarolangun)



Pada sasaran ini ditetapkan 2 (Dua) Indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan sebesar 4.51% dan realisasinya 2,25%, kemudian indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang ditargetkan 70.72% dan realisasinya 70.08%.

3.1.16. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan Rasio jumlah pengangguran terbuka dengan jumlah angkatan kerja, didalam IKU target TPT tahun 2018 adalah sebesar 4.51% dan realisasinya adalah sebesar 2,25% dengan capaian kinerja sebesar 150,11%. Berarti Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) kabupaten Sarolangun cukup rendah atau kecil jika dibandingkan dari yang ditargetkan sehingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan. Menurunnya TPT tersebut sebagai dampak dari adanya peningkatan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang bersifat padat karya sehingga banyak menyerap tenaga kerja.

Secara konseptual pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) berarti banyak angkatan kerja yang semula menganggur sekarang terserap dalam mengisi kesempatan kerja yang tersedia diberbagai lapangan kerja, baik pada sector-sektor formal seperti di perusahaan atau lembaga-lembaga berbadan hukum lainnya maupun pada sector-sektor informal seperti lapangan usaha mandiri atau berwirausaha.

Faktor-faktor penghambat terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka adalah rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja yaitu SLTA kebawah, angkatan kerja yang sudah menamatkan pendidikan tertentu tapi belum mempunyai pengalaman kerja,



banyaknya penduduk usia kerja yang masuk menjadi Angkatan kerja karena sudah menamatkan pendidikan atau tidak melanjutkan pendidikan lagi, atau karena adanya PHK sehingga lowongan kerja yang tersedia tidak dapat diisi dan menjadi penganggur, lowongan kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang bersangkutan

Solusi untuk Tahun kedepan maka diperlukan kebijakan dibidang ketenagakerjaan yaitu mempersiapkan tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja, peningkatan investasi untuk membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, kebijakan penempatan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pemagangan di dalam negeri (di perusahaan) dan pemagangan di luar negeri, peningkatan pelatihan di BLK dan pelatihan kewirausahaan dan penciptaan wirausaha baru melalui pemberdayaan tenaga kerja mandiri.

3.1.17. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPAK merupakan rasio jumlah Angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja yaitu penduduk berumur 15 tahun keatas. Target TPAK tahun 2018 adalah 70.72% sedangkan Realisasinya mencapai 70.08% dengan tingkat capaian 99,10%, berarti terdapat peningkatan partisipasi angkatan kerja dan melebihi dari yang ditargetkan. Meningkatnya TPAK tersebut salah satu kemungkinannya disebabkan oleh tingginya partisipasi penduduk usia kerja untuk memasuki dunia kerja dan berpartisipasi aktif dalam proses produksi barang dan jasa dan secara langsung dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan arena tingginya minat masyarakat untuk bekerja atau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.



Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan gambaran jumlah penduduk yang bersedia secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk usia kerja. Sejalan dengan diimplementasikannya program pendidikan 9 tahun serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang lebih tinggi, maka kualitas angkatan kerja kabupaten Sarolangun secara umum akan terus meningkat. Program pendidikan akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas angkatan kerja yang tercermin dari semakin meningkatnya jumlah angkatan kerja yang berpendidikan SMP keatas dan menurunnya jumlah angkatan kerja berpendidikan SD.

Dalam analisa pola perkembangan TPAK ditelaah dengan mengamati perkembangan menurut susunan umur dan jenis kelamin. Perkembangan TPAK untuk setiap golongan umur dan jenis kelamin mempunyai pola yang beragam, secara teoritis pada umur muda 15-24 tahun perkembangan TPAK pada umumnya menurun, karena TPAK pada umur muda tersebut digunakan untuk bersekolah, demikian juga dengan TPAK umur tua 60 tahun keatas maka partisipasi mereka dalam angkatan kerja semakin kecil atau menurun karena sudah tidak produktif lagi. Pengaruh umur dan kegiatan mereka kebanyakan adalah untuk menjaga kesehatan karena telah memasuki masa pensiun, sedangkan penduduk usia potensial adalah 25-60 tahun TPAK mereka umumnya akan tetap tinggi sesuai dengan peran mereka dalam kehidupan rumah tangganya, TPAK pada umur produktif ini aktif berperan dalam ekonomi karena ada dorongan semangat untuk ingin cepat bekerja atau memberi nafkah untuk keluarga. TPAK berdasarkan jenis kelamin juga mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja. TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan karena peran tenaga kerja laki-laki pada umumnya lebih tinggi yaitu sebagai kepala



keluarga yang bertanggung jawab mencari nafkah dalam menghidupi keluarganya. Sedangkan TPAK tenaga kerja perempuan lebih rendah karena perempuan lebih banyak berperan dalam mengurus rumah tangga, sehingga sebagian besar dari perempuan dikategorikan tidak masuk Angkatan kerja tetapi hanya masuk pada penduduk usia kerja, tetapi dengan semakin tingginya tingkat pendidikan perempuan maka peran perempuan dalam mencari nafkah dalam keluarga semakin meningkat.

Solusi untuk tahun kedepannya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun memiliki potensi untuk membangun daerahnya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, berbagai pembangunan dilakukan yang mencakup sektor pertanian, industry, perdagangan, jasa, pendidikan, perkebunan, pertambangan dan sector-sector lainnya. Melalui kegiatan pembangunan tersebut diharapkan dapat memberi peluang bagi para pencari kerja di daerahnya serta dapat membuka peluang kesempatan kerja.

TABEL 3.10
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 8
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
8.	Meningaktanya Pengamalan Nilai-nilai Agama dan Pengembangan Budaya Lokal Dalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Buta Aksara Al-Quran	%	15	14,28	95,2

(Sumber data Bina Kesra Kab. Sarolangun)

3.1.18. *Persentase Buta Aksara Al-Quran*

Dari table diatas dapat kita lihat dimana target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Sarolangun tahun 2017-2022, sebesar 15% dan realisasi sebesar 14,28% dengan capaian 95,2% dimana untuk setiap tahunnya untuk



10 kecamatan Kabupaten Sarolangun telah ditargetkan sebanyak 7000 anak untuk 5 tahun. Untuk tahun 2018 ini yg lulus dalam khatam Al-quran sebanyak 1000 anak. Target dari bina kesra setiap tahunnya 1000 anak yang akan dikhatam al-quran. Artinya kegiatan dalam mengurangi buta aksara Al-quran berjalan dengan baik.

TABEL 3.11
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 9
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
9.	Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,57	4,69	102,62

(Sumber data BPS Kab. Sarolangun)

3.1.19. *Pertumbuhan Ekonomi*

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Dari tabel sasaran Sembilan dapat kita lihat bahwasannya dari target yang telah ditetapkan sebesar 4,57% dengan realisasi sebesar 4,69 atau dengan capaian 102,62 persen ini artinya pertumbuhan ekonomi dikabupaten sarolangun cukup Signifikan.



Tabel 3.1. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sarolangun Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017
Table 3.1. Percentage Distribution of Gross Regional Domestic Product of Sarolangun Regency at Current Market Prices by Industry 2013–2017

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>	27,04	27,04	27,93	29,27	28,95
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	29,45	26,72	22,18	19,84	21,20
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4,29	4,20	4,20	4,09	4,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Garbage Management, Waste and Recycling</i>	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	11,86	13,62	14,68	14,72	14,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail; Cars and Motorcycles Repairation</i>	6,79	7,16	7,84	8,28	8,17
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Warehousing</i>	1,77	1,84	2,00	2,05	2,01
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1,79	1,88	2,01	2,08	2,14
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	3,04	3,10	3,42	3,71	3,69
K	Jasa Keuangan/ <i>Financial Services</i>	2,64	2,67	2,75	2,77	2,69
L	Real Estat/ <i>Real Estate</i>	1,29	1,26	1,34	1,36	1,32
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0,24	0,24	0,25	0,26	0,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4,30	4,91	5,81	5,84	5,64
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education Services</i>	2,89	2,72	2,80	2,82	2,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	1,08	1,17	1,25	1,32	1,30
R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	1,35	1,33	1,39	1,43	1,40
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Sarolangun pada tahun 2017 meningkat. Peningkatan Nilai PDRB Kabupaten Sarolangun atas dasar harga konstan 2010, mencapai 9,81 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 9,37 triliun rupiah pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,69 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,26 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2017 terutama dipercepat oleh adanya investasi fisik dan perbaikan harga untuk komoditas batu bara. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan jembatan. Pada 2017, pemerintah Sarolangun telah memulai pelebaran Jalan Lintas Sumatera dari Desa Bernai ke Desa Sungai Abang sepanjang 3,5 km. Selain itu, pemerintah juga membangun median jalan jalur dua di Jalan Lintas Sumatera di daerah Tanjung Rambai.

Disisi lain, harga batu bara yang membaik di sepanjang tahun 2017 juga turut menunjang peningkatan kinerja perekonomian Sarolangun. Adanya peningkatan harga pada tahun ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan dari pasar luar negeri terutama Tiongkok. Peningkatan harga jual batubara pada akhirnya mendorong perusahaan yang sebelumnya tidak beroperasi kembali beroperasi pada tahun 2017.

Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 7,82 persen dan yang terendah adalah Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,05 persen. Salah satu penyebab tingginya pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yakni menjamurnya rumah makan, café, dan restoran selama tahun 2017.



Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen. Sedangkan delapan lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga sepuluh persen tersebut antara lain pertambangan dan penggalian sebesar 5,12 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 6,51 persen; Konstruksi sebesar 5,00 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,55 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,82 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 5,30 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,45 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,60 persen; serta Jasa Lainnya sebesar 5,70 persen.

TABEL 3.12
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 10
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
10.	Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah	Indeks Gini	%	0,336	0,290	115,86

(Sumber data DPMD DAN BPS Kab. Sarolangun)

3.1.20. Indeks Gini

Dalam upaya mencapai Sasaran strategis Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah pada Tahun 2018 memiliki 1 Indikator kinerja yang harus dicapai, adapun indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut :



Pesentase Indeks GINI Rasio untuk tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 0,336 % dengan realisasi 0,290 % rata-rata pendapatan dan pengeluaran dari 10 Kecamatan di Kab. Sarolangun

TABEL 3.13
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 11
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
11.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	9,08	8,87	102,31

(sumber data BPS Kab. Sarolangun)

3.1.21. *Persentase Penduduk Miskin*

Dari table diatas dapat kita lihat dimana target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD untuk persentase penduduk miskin sebesar 9,08 persen. Pada posisi tahun 2018 dilihat dari data ternyata tingkat persentase penduduk miskin menurun menjadi 8,87%. Ini artinya merupakan kesuksesan Kabupaten Sarolangun dalam menangani angka kemiskinan walaupun angka yang didapat tidak terlalu signifikan, dimana factor – factor yang membuat angka kemiskinan dikabupaten sarolangun menurun. Ini tidak lepas dari Program –program bapak bupati yang telah dilaksanakan. Dimana pembangunan infrastruktur yang semakin baik di daerah desa-desa terpencil. Sehingga aktifitas masyarakat mengalami peningkatan artinya pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat. Dan pastinya akan menaikkan taraf pendapatan masyarakat. Kemudian dilihat dari program PMKS yang ada dikabupaten sarolangun juga merupakan salah satu pengetasan dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada Kabupaten Sarolangun.



TABEL 3.14
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 12
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
12.	Meningkatnya Kapasitas dan Kemandirian Daesa	Indeks Desa Membangun (IDM)	%	40,27	33,55	83,31

(sumber data DPMD Kab. Sarolangun)

3.1.22. Indeks Desa Membangun(IDM)

Dalam upaya mencapai Sasaran strategis Meningkatkan kapasitas dan Kemandirian Desa pada Tahun 2018 memiliki 1 Indikator kinerja yang harus dicapai, adapun indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut :

Pesentase Indeks Desa Membangun (IDM) untuk tahun 2017 yang ditargetkan sebesar 40,42 % realisasi 41,61 % atau 50 Desa yang telah kategorikan desa maju dan berkembang dari 149 desa dengan formulasi Jumlah desa Maju dan berkembang dibagi jumlah seruruh desa di Kab. Sarolangun

TABEL 3.15
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 13
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
13.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan	Pengeluaran Perkapita	%	767,52	961,27	125,24

(Sumbe data DPMD,BPS Kab. Sarolangun)



3.1.23. *Pengeluaran Perkapita*

Dalam upaya mencapai Sasaran strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Tahun 2018 memiliki 1 Indikator kinerja yang harus dicapai, adapun indikator Kinerjanya adalah sebagai berikut :

Pengeluaran Perkapita untuk tahun 2018 yang ditargetkan sebesar Rp.767,52realisasi Rp. 961,27 rata-rata pengeluaran Rumah Tangga dari 10 Kecamatan di Kab. Sarolangun

TABEL 3.16
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 14
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
14.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Beragam Berbasis Sumber Daya Lokal	Persentase Tercukupinya Pangan Pada Tingkat Rumah Tangga Dalam Jumlah, Mutu, Ragam, Keamanan Serta Keterjangkauan Harga	%	66	82,30	124,70

(Sumber data Dinas KP Kab. Sarolangun)

3.1.24. *Persentase Tercukupinya Pangan Pada Tingkat Rumah Tangga Dalam Jumlah, Mutu, Ragam, Keamanan Serta Keterjangkauan Harga*

Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumberdaya lokal. Sasaran ini sesuai dengan misi ketiga kepala daerah yaitu meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan yaitu Tercukupinya pangan pada tingkat rumah tangga dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta



keterjangkauan harga. Satuan yang dipergunakan untuk pengukuran IKU tersebut adalah Skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energy dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energy dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Target yang ditetapkan pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022 adalah sebesar 66 pada tahun 2018. Dari target tersebut berdasarkan hasil pengukuran PPH pada tahun 2018 telah tercapai hasil 82,30. Hal ini berarti realisasi capaian kinerja pada tahun 2018 telah melebihi target dan persentase capaiannya sebesar 124,70%. Analisis berdasarkan faktor-faktor penyebab keberhasilannya Tujuan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk, yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) berdasarkan: cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli. Faktor-faktor penyebab tingginya skor PPH yaitu beragamnya konsumsi pangan sehingga tidak bergantung pada pangan pokok utama yaitu beras.

Analisis berdasarkan factor- factor penghambatnya Kurang beragam dan seimbang nya konsumsi pangan dimana komposisi padi-padian, umbi-umbian pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah tidak berimbang. Solusi Untuk Tahun Kedepannya Dengan memperhatikan hasil capaian skor Pola Pangan Harapan maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan capaian target indicator kinerja utama melalui berbagai kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan yang dapat mendukung peningkatan skor pola pangan harapan.



Adapun Formulasi yang digunakan untuk menghitung Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Yaitu :

Skor PPH = Skor PPH kelompok padi-padian + umbi-umbian + pangan hewani + minyak dan lemak + buah/ biji berminyak + kacang-kacangan + gula + sayur dan buah + skor PPH kelompok lain-lain.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh melalui Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Lampiran penghitungan Skor PPH dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.16.1 Penghitungan Skor PPH

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Padi-padian	331.6	1,318.3	58.9	65,95	0.5	29.4	33.0	25.0	25.0
2	Umbi-umbian	45.8	49.2	2.2	2.5	0.5	1.1	1.2	2.5	1.2
3	Pangan Hewani	114.9	204.2	9.1	10.2	2.0	18.2	20.4	24.0	20.4
4	Minyak dan Lemak	39.3	354.3	15.8	17.7	0.5	7.9	8.9	5.0	5.0
5	Buah/Biji Berminyak	10.0	53.7	2.4	2.7	0.5	1.2	1.3	1.0	1.0
6	Kacang-kacangan	15.8	39.0	1.7	2.0	2.0	3.5	3.9	10.0	3.9
7	Gula	30.9	112.7	5.0	5.6	0.5	2.5	2.8	2.5	2.5
8	Sayur dan Buah	188.4	93.1	4.2	4.7	5.0	20.8	23.3	30.0	23.3
9	Lain-lain	30.4	15.6	0.7	0.8	-	-	-	-	-
total			2,240.2	100.0	112.0		84.6	94.8	100.0	82.3

(sumber data SUSENAS)



TABEL 3.17
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 15
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
15.	Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan	Tingkat Pencemaran Lingkungan	Peringkat	Sedang	Ringan	200

(Sumber data DLH Kab. Sarolangun)

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun tahun 2018 disajikan sebagai berikut:

Untuk Sasaran Menurunnya Tingkat Pencemaran Lingkungan terdapat satu indikator yaitu:

3.1.25. Tingkat Pencemaran Lingkungan

Dari target yang ditetapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun dari Indikator Kinerja Utama Tingkat Pencemaran Lingkungan capaiannya melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Untuk tahun 2018 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun menetapkan target Tingkat Pencemaran Lingkungan pada skala sedang dapat dilihat pada table pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tingkat Pencemaran Lingkungan yang diukur adalah pencemaran air, dimana status mutu air dihitung berdasarkan Permen LHK Nomor P.78/Menlhk/Setjen/SET.1/2016 dengan mengklasifikasikan mutu air dalam 4 kelas:

1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik pada rentang 0-1
2. Tercemar ringan jika pada rentang 1-5
3. Tercemar sedang jika pada rentang 5-10



4. Tercemar berat jika pada rentang >10

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi pada tahun 2018 sebesar 100%, dari target yang ditetapkan pada peringkat sedang terealisasi pada peringkat ringan dengan status mutu air 1,7 sehingga tingkat capaian kinerja yang dihasilkan dua kali lipat.

Hal ini dikarenakan pengawasan terhadap pelaku dunia usaha dilakukan secara optimal sehingga tingkat pencemaran dapat ditekan. Serta diharapkan kedepan pelaku dunia usaha dan masyarakat lebih peka dan peduli lagi terhadap lingkungan agar tingkat pencemaran dapat terus dikurangi.

TABEL 3.18
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 16
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
16.	Mempertahankan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Terhadap Perubahan Iklim	Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dokumen	Tidak	Ada	200

(Sumber data DLH Kab. Sarolangun)

3.1.26. Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Untuk indikator tersedianya dokumen indeks kualitas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun pada tahun awal RPJMD tidak menetapkan target, namun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun mampu untuk menyusun dokumen indeks kualitas lingkungan hidup. Sehingga indikator tersedianya dokumen indeks kualitas lingkungan hidup tercapai atau sebesar 100%. Dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang tadinya tidak ada penetapan target namun mampu untuk dihitung berapa besaran angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.18.1 Sasaran
Target dan Realisasi Capaian Indikator
Tersedianya Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018		
		Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	62,67	100

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sarolangun pada angka 63 dimana perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan rumusan:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: $(IKA30\%)+(IKU30\%)+(ITH40\%)$

- Ket: - IKA (Indeks Kualitas Air)
- IKU (Indeks Kualitas Udara)
 - ITH (Indeks Tutupan Lahan)

Hasil perhitungan dari tiga indeks di atas maka didapat hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup $15+28,4+19,43=62,67$.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang disusun oleh Kabupaten Sarolangun mendukung untuk pengukuran I Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional.



SASARAN 17 TABEL 3.19
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 17 PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
17.	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Pemerintahan yang Baik	Predikat Sakip	Peringkat	CC	B	200
		Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Peringkat	WTP	WTP	100

(Sumber data Bagian Organisasi dan Inspektorat Kab. Sarolangun)

3.1.27. *Predikat Sakip*

Untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 sudah mencapai pada nilai hasil LHE (Laporan Hasil Evaluasi LAKIP dari Kementrian PAN dan RB Republik Indonesia, dimana pada tahun 2017 sudah meraih predikat “ **B** “ (Baik) dengan bobot nilai 60,61 dimana pada tahun 2016 nilai LAKIP Kabupaten Sarolangun adalah “ **B** ” (Baik) dengan skor 60,02. Pada tahun 2017 hanya mengalami peningkat skor yang tidak signifikan. Untuk itu Pemerintahan Kabupaten Sarolangun terus berusaha untuk memperbaiki sistem SAKIP agar bisa meraih predikat “ **BB** ” untuk tahun kedepannya.

3.1.28. *Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan*

Dapat kita lihat dari table diatas bahwasnya Opini BPK mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP) berkat semakin tertibnya pengelolaan keuangan dan asset serta pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh SKPD beberapa upaya telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sarolangun untuk meningkatkan tertib pengelolaan keuangan dan menyelesaikan asset-aset daerah yang bermasalah diantaranya :



1. Dalam melakukan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara parallel bersamaan penyusunan LKPD.
2. Melakukan pendampingan terhadap tim asset daerah untuk melakukan penelusuran asset daerah sesuai dengan dokumen kepemilikan asset daerah.
3. Melakukan pemantauan penyelesaian tindak lanjut realisasi temuan BPK

SASARAN 17 TABEL 3.20
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 18 PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
18.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas	Tingkat Keselarasan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Diatasnya	%	86,04	90,70	105,42

(Sumber data BAPPEDA Kab. Sarolangun)

3.1.29. Tingkat Keselarasan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Diatasnya.

Sasaran strategis pengukuran kinerja Bappeda Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 diharapkan dari target yang telah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. Adapun Sasaran strategis tersebut adalah dalam upaya mencapai sasaran strategis Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan, Indikator kinerja yang harus dicapai adalah Jumlah Renja SKPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya dibagi seluruh dokumen Renja SKPD tahun 2018 adalah sebesar 86,04 %, dan terealisasi sebesar 90,70 % atau dengan capaian 105,42 %. Pengukuran capaian kinerja dengan formulasi 37 Renja SKPD yang sesuai dengan dokumen perencanaan di atasnya dari 43 SKPD yang ditargetkan untuk jangka menengah.



Penyebab keberhasilan dalam rangka melakukan proses perencanaan adalah Penggunaan Sistem Aplikasi E-Planning mulai Tingkat Musrembang Des/Kel, Kecamatan dan Musrembang RKPD Kabupaten.

Penyebab keberhasilan dalam proses evaluasi adalah Melaksanakan Kegiatan paparan Kepala OPD Kepada Bupati atas laporan pelaksanaan program dan kegiatan terutama terkait dengan realisasi keuangan dan pencapaian kinerja.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya, berbagai upaya telah dilakukan untuk menuntaskan program dan kegiatan walau dengan sumber daya yang terbatas baik segi anggaran maupun segi SDM yang ada, namun pelaksanaannya diupayakan terealisasi sesuai target yang telah ditetapkan terutama terkait dengan efisiensi anggaran kegiatan fisik telah terealisasi 100 persen, sedangkan realisasi keuangan sebesar 88,76 %.

**SASARAN 17 TABEL 3.21
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 19 PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
19.	Meningkatnya Jaminan Kapasitas Hukum dan Perlindungan Hukum	Persentase Penyelesaian Perda	%	85	40	47

(Sumber data Bagian Hukum Kab. Sarolangun)

3.1.30. Persentase Penyelesain Perda.

Pada sasaran meningkatnya jaminan kapasitas hukum dan perlindungan hukum, didalam dokumen RPJMD telah ditargetkan sbesar 85 persen, dan pada tahun 2018 terealisasi sebesar 40 persen atau dengan capaian sebesar 47, dimana pada tahun 2017 bulan November dengan nomor 188,342/0754/Hk-HAM/2017 dengan hal, *penyampaian Propemperda Pemda Kab. Sarolangun tahun 2018*, yaitu sebanyak 10 Propemperda, dimana 10 Propemperda ini disusun berdasarkan program yang ada



dalam pelaksanaan pemerintah daerah, usulan OPD sesuai dengan kebutuhan yang dimasukkan kedalam Propemperda Kab. Sarolangun.

Dari table diatas dan uraian proses penyampaian propemperda dapat kita simpulkan bahwasannya dari target yang ditentukan, dengan realisasi yang tidak sesuai harapan, dimana dari 10 dokumen Ranperda hanya di setuju oleh pihak DPRD hanya 4 dokumen yang menjadi Perda, artinya hambatan itu terjadi pada saat proses pembahasan/legalisasi dari pihak Legeslatif. Dokumen yang yang disetujui adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
2. Pertanggung Jawaban APBD Tahun 2017.
3. APBD Tahun 2019.

SASARAN 17 TABEL 3.22
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 20 PEMERINTAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
20.	Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Daerah dan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	66,67	90,44	135,65
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	60,83	80,4	132
		Indeks Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	%	41,02	100	243,78

(Sumber data DP3A & BPS Kab. Sarolangun)



3.1.31. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tabel. 3.22.1 IPG
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Jambi
Tahun 2015-2017

Kode	Prov/Kab/Kota	Pengeluaran Perkapita Laki-laki (Rp 000)			Pengeluaran Perkapita Perempuan (Rp 000)			IPM L			IPM P			IPG		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1500	JAMBI	14,013	n/a	14,962	6,841	n/a	7,081	73.35	n/a	74.64	64.87	n/a	65.78	88.44	n/a	88.13
1501	Kerinci	13,842	n/a	14,767	6,502	n/a	6,712	74.44	n/a	75.69	63.82	n/a	65.07	85.72	n/a	85.97
1502	Merangin	13,526	n/a	14,073	6,457	n/a	6,601	71.32	n/a	72.56	62.13	n/a	63.59	87.12	n/a	87.64
1503	Sarolangun	15,844	n/a	16,509	9,501	n/a	9,673	72.29	n/a	73.34	65.51	n/a	66.33	90.62	n/a	90.44
1504	Batanghari	14,764	n/a	15,273	5,550	n/a	5,637	73.41	n/a	74.27	61.61	n/a	62.52	83.93	n/a	84.18
1505	Muara Jambi	11,846	n/a	12,945	3,480	n/a	3,749	71.81	n/a	73.11	56.31	n/a	58.06	78.41	n/a	79.41
1506	Tanjung Jabung Timur	12,736	n/a	13,695	5,522	n/a	5,939	66.84	n/a	67.61	56.60	n/a	58.52	84.68	n/a	86.56
1507	Tanjung Jabung Barat	12,552	n/a	13,405	5,053	n/a	5,344	69.28	n/a	70.34	58.75	n/a	60.10	84.81	n/a	85.44
1508	Tebo	13,696	n/a	14,413	7,749	n/a	7,973	71.31	n/a	72.77	65.11	n/a	65.54	91.31	n/a	90.06
1509	Bungo	16,250	n/a	16,934	8,054	n/a	8,189	73.21	n/a	73.95	64.53	n/a	65.19	88.15	n/a	88.15
1571	Kota Jambi	14,086	n/a	15,312	10,406	n/a	10,926	78.73	n/a	80.05	74.53	n/a	75.61	94.67	n/a	94.45
1572	Kota Sungai Penuh	11,652	n/a	11,954	9,391	n/a	9,480	77.17	n/a	77.71	72.40	n/a	73.03	93.82	n/a	93.98

(Sumber BPS Kab. Sarolangun)

Dapat kita lihat dari table diatas bahwasannya IPG Kabupaten Sarolangun sebesar 90,44 dan IPM Kabupaten Sarolangun Sebesar 66,33.

3.1.32. indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Kesetaraan Gender bukan hanya merujuk pada persoalan persamaan Status dan kedudukan saja tetapi bisa bermakna pada persoalan persamaan peran, dalam hal ini seperti partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik maupun penyelenggaraan pemerintah, kehidupan ekonomi dan social khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga. Unsur-unsur persamaan peranan tersebut



merupakan komponen yang tercakup dalam penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Jadi IDG merupakan ukuran indeks komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial.

3.1.33. Indeks Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

Pada indikator Indeks Penanganan kasus kekerasan Perempuan dan Anak dapat kita analisisnya sebagai berikut:

- a. Cakupan Perempuan dan Korban Kekerasan, penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sekitar 50%
- b. Adanya dukungan dan keinginan politisi yang kuat dari Kepala Daerah
- c. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukum
- d. Adanya Kelembagaan yang Tupoksinya terkait dengan bidang kegiatan yang ditangani
- e. Terbukanya peluang untuk bermitra dengan pihak luar (swasta dan LSM)
- f. Adanya ketentuan yang mewajibkan Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan program/kegiatan yang berpihakan kepada masyarakat termasuk perempuan dan anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 telah menetapkan 37 Kegiatan dari 8 Program Sasaran Strategi sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2017- 2022. Dengan rincian realisasi program sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Di dalam program ini terdapat 11 (sebelas) kegiatan dimana dari sebelas kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 96,11%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Di dalam program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dimana dari empat kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 99,65%.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Di dalam program ini terdapat 1 (Satu) kegiatan dimana dari satu kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 98,21%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Di dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan dimana dari Satu kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 99,95%.

4. Program Peningkatan dan Pengembangan Promosi Daerah

Di dalam program ini terdapat 2 (Dua) kegiatan dimana dari enam kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 85,67 %

6. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Di dalam program ini terdapat 6 (Enam) kegiatan dimana dari enam kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 99,97 %.

7. Program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak

Di dalam program ini terdapat 8 (delapan) kegiatan dimana dari delapan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 99,98 %.

8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Di dalam program ini terdapat 4 (empat) kegiatan dimana dari empat kegiatan tersebut dapat dilaksanakan semua dengan tingkat realisasi 99,39 %.



SASARAN 17 TABEL 3.23
PENGUKURAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN 21
PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2018		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
21.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Perizinan	Nilai	80,20	83,66	104,31
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Nilai	75,80	77,84	102,69
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kependudukan	Nilai	76,5	76,542	100,05

(Sumber data DPMPSTP, DINKES, DIS DUKCAPIL)

3.1.34. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dihitung dengan menggunakan “ nilai rata-rata tertimbang “ masing-masing unsur pelayanan dalam penghitungan SKM terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus

$$\text{Bobot Nilai rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

Untuk memperoleh nilai survey Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai repersepsi per unsur}}{\text{jumlah unsur}} \times \text{nilai penimbang}$$

Total unsur yang terisi Analisis Hasil Bersarkan hasil penelitian maka dapat hasil perhitungan sebagai tabel berikut :

Tabel. 3.23.1 Nilai rata-rata unsur pelayanan semester II Dinas PMPTSP Kab. Sarolangun



Bulan Juli s/d Desember 2018.

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	
U2	Sistem, Mekanisme, Prosedur	3,340
U3	Waktu Penyelesaian	3,380
U4	Biaya / Tarif	3,260
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,320
U6	Kompetensi pelaksana	3,380
U7	Perilaku pelaksana	3,480
U8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,260
U9	Sarana dan prasarana	3,500

Maka untuk mengetahui survey unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut :

Nilai unsur Pelayanan

$$(3,229 \times 0,011) + (3,380 \times 0,011) + (3,260 \times 0,011) + (3,320 \times 0,011) + (3,380 \times 0,011) + (3,480 \times 0,011) + (3,260 \times 0,011) + (3,500 \times 0,011) = \mathbf{3,347}$$

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

$$= 3,347 \times 25 = 83,664$$

2. Mutu Pelayanan “ B”

3. Kinerja unit pelayanan “ Baik “

RESPONDEN

JUMLAH = 50 Orang

JENIS KELAMIN

L = 38 orang

P = 12 orang

"LKJ PEMERINTAH KAB.SAROLANGUN 2018"



PENDIDIKAN

SD = - orang

SMP = - orang

SMA = 26 orang

DIII = 11 orang

S.1 = 13 orang

S.2 = - orang

Keberhasilan dalam mencapai target Sasaran strategi Dinas PMPTSP

Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

1. *Mendapat ISO 9001 dari lembaga IAPMO R&T Jakarta*
2. *Masyarakat dalam mengurus perizinan sesuai dengan SOP*

**Tabel 3.23.2 Evaluasi pencapaian sasaran
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun Tahun 2018**

Indikator Sasaran		Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Sasaran				
			Tahun 2018				
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Keterangan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	70.2	75.80	77.49	102.2	Sangat Baik	Tercapai dan melewati target

(Sumber DPMPTS Kab. Sarolangun)

3.1.35. Indeks Kepuasan Dinas Kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai indikator untuk melihat kualitas pelayanan public yang merupakan tujuan akhir dari reformasi birokrasi. Untuk capaian indikator IKM tahun 2018 telah mencapai target yaitu 77.49% dari target 75.80%.

Faktor yang mendorong tercapainya IKM adalah karena semua indikator yang

"LKJ PEMERINTAH KAB.SAROLANGUN 2018"



dilakukan survey nilainya adalah baik. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di puskesmas sudah baik.

3.1.36. Indeks Kepuasan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Untuk mengetahui indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun maka dilakukan penjumlahan dari nilai rata-rata 14 unsur yang diamati dikalikan dengan angka penimbang yang sama yaitu 0.071 (lihat Bab Metodologi). Hasil perhitungan seperti terlihat pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun adalah sebesar **3,062**. Dari hasil perhitungan ini maka dapat disimpulkan bahwa nilai IKM setelah di konversi adalah sebesar **76,542** dengan mutu pelayanan pada **level B**. Ini berarti, kinerja unit pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun **Kategori Baik**. Kesimpulan analisis IKM pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun terlihat pada Tabel

Tabel. 3.23.3. Nilai Unsur Pelayanan Pada Unit Pelayanan Dinas Dukcapil Kab Sarolangun

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN	INDEKS KEPUASAN (Kolom 3 x 0.071)
1	2	3	4
1	Prosedur Pelayanan	2.857	0.203
2	Persyaratan Pelayanan	3.529	0.251
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	2.871	0.204
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	3.234	0.230
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	2.757	0.196
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	3.250	0.231
7	Kecepatan Pelayanan	2.614	0.186
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	3.159	0.224



9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3.165	0.225
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	3.600	0.256
11	Kepastian Biaya Pelayanan	3.686	0.262
12	Kepastian Jadwal Pelayanan	2.986	0.212
13	Kenyamanan Lingkungan	2.671	0.190
14	Keamanan Pelayanan	2.743	0.195
INDEK KEPUASAN MASYARAKAT			$\Sigma = 3,062$

(Sumber : Hasil Survei)

Tabel. 3.23.4 Kesimpulan Analisis IKM

No	Indikator	Kesimpulan
1	IKM Setelah di Konversi	76,542
2	Mutu Pelayanan	B
3	Kinerja Unit Pelayanan	Baik

(Sumber : Hasil Survei)

3.2. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Dalam penyusunan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Dalam penyusunan teknis anggaran berbasisi kinerja tahun 2018 digunakan rencana strategi yaitu RPJMD yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD).

Kuangan daerah merupakan faktor penting untuk menjalankan fungsi atau kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini karena hampir tidak ada program atau kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan pendanaan yang bersumber dari keuangan daerah. Semakin besar jumlah dana yang tersedia semakin banyak pula kemungkinan program atau kegiatan pemerintah yang dapat dilaksanakan. Fakta dan Permasalahan dari Keuangan Daerah sebagai berikut:

"LKJ PEMERINTAH KAB.SAROLANGUN 2018"



1. Penerimaan PAD kabupaten/kota di Provinsi Jambi masih tergantung pada penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan PAD lainnya yang sah.
2. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada awal tahun pelaksanaan RPJMD mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan penerimaan dari dana perimbangan masih lebih kecil. Kondisi ini mengindikasikan tingkat ketergantungan daerah ini terhadap pemerintah pusat setiap tahunnya mengalami penurunan secara persentase, akan tetapi secara nominal bantuan yang diterima kabupaten/kota di Provinsi Jambi terus meningkat dalam jumlah yang cukup besar.
3. Pembiayaan daerah ini masih mengharapkan dari pemerintah pusat, karena objek pajak yang ada di kabupaten/kota di Provinsi sangat terbatas sebagai sumber pendapatan daerah, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi pajak dan retribusi daerah yang ada.

3.2.1. Komposisi APBD Kabupaten Sarolangun Tahun 2016-2018.

Pengelolaan keuangan daerah secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu manajemen penerimaan dan manajemen pengeluaran daerah. Kedua komponen tersebut sangat menentukan kedudukan suatu Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah. Pengelolaan keuangan kabupaten Sarolangun periode tahun 2016 - 2018 telah dilaksanakan dengan cukup baik. Kondisi ini ditandai semakin meningkatnya pendapatan daerah kabupaten Sarolangun dari tahun 2016 sampai tahun 2018 terus mengalami peningkatan .

Porsi belanja juga semakin meningkat setiap tahunnya, walaupun setiap tahun APBD Kabupaten Sarolangun mengalami defisit, tetapi masih bisa ditutup dengan pembiayaan pada tahun bersangkutan. Struktur APBD terdiri dari 3 komponen yaitu



Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Adapun perkembangan Pendapatan Daerah kabupaten Sarolangun dapat disajikan pada Grafik berikut:

Grafik 3.1.
Pendapatan Daerah Kab. Sarolangun
Tahun 2016-2018



Sumber : BPKAD Kab. Sarolangun

Dari Grafik 3.1. diatas dapat dilihat bahwa pendapatan daerah Kab. Sarolangun tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan. Komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Peningkatan pendapatan daerah ini dikarenakan adanya peningkatan dari komponen pendapatan asli daerah (PAD) dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk komponen pendapatan asli daerah, pada tahun 2016 jumlah PAD kabupaten Sarolangun sebesar Rp 64.282.000.246,79 mengalami peningkatan sebesar 17,40 persen menjadi Rp 75.468.864.272,80 tahun 2017. Pada tahun 2018, PAD Kabupaten Sarolangun sebesar Rp 99.780.471.647,00 mengalami peningkatan sebesar 32,21 persen dari tahun 2017.



Untuk komponen pendapatan daerah lainnya yaitu Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2016 sebesar Rp.874.342.327.800,00 mengalami peningkatan sebesar 0,70 persen, pada tahun 2017 menjadi Rp.880.523.100.010,00 dan pada tahun 2018 Dana Perimbangan Kabupaten Sarolangun sebesar Rp 866.560.614.394,00 mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dari tahun 2017.

Sedangkan untuk komponen Lain-lain pendapatan daerah yang sah, pada tahun 2016 sebesar Rp 125.763.490.982,00 mengalami peningkatan sebesar 72,01 persen pada tahun 2017 menjadi Rp 206.328.561.982,00. Hal ini dikarenakan adanya transfer Dana Desa dari pemerintah Pusat yang telah diamanahkan oleh UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

3.2.2. Komposisi PAD Kabupaten Sarolangun Tahun 2014-2018.

Penerimaan daerah berupa PAD harus dipicu pertumbuhannya secara terus-menerus, melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun harus juga mampu meningkatkan kemampuannya dalam menyelenggarakan urusan daerah.

Tabel 3.23.5
Komposisi PAD Kabupaten Sarolangun (juta rupiah)
Tahun 2014-2018.

No	Jenis Penerimaan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Pajak Daerah	8,678	10,287	33,453	11,044	16,204
2	Retribusi Daerah	4,252	3,234	2,982	2,432	2,535
3	HPKDYd	3,806	2,713	3,673	3,673	11,721
4	Lain-lain PAD Yang Sah	17,686	27,836	52,632	58,319	69,320
	Jumlah	34,422	44,070	92,740	75,468	99,780

Sumber : BPKAD Kabupauten Sarolangun.



Dari table 3.23.5 diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara keseluruhan. Komponen PAD terdiri dari 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. HPK Dyd dan 4. Lain-lain PAD Yang Sah. Peningkatan Pajak Daerah ini disebabkan adanya peningkatan Target Penerimaan Pajak Daerah dari tahun sebelumnya, pada tahun 2016 Pajak Daerah sebesar Rp.33.453.454.904,00, lonjakan penerimaan ini dikarenakan adanya penerimaan dari BPHTB. Pada tahun 2017 Pajak Daerah kembali mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar Rp.11.044.100.000,00 dan pada tahun 2018 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp.16.204.100.000,00.

Retribusi Daerah justru mengalami penurunan target penerimaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sebesar Rp.2.990.810.000,00 tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 22,94 persen menjadi sebesar Rp.2.432.200.000,00 hal ini dikarenakan adanya tidak tercapainya target-target Retribusi dari tahun 2016 yang berimplikasi pada penurunan target Retribusi tahun 2017. Pada tahun 2018 ada kenaikan target dari tahun 2017 yaitu sebesar Rp.2.535.541.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2018 kecuali tahun 2015 yaitu sebesar Rp.2.712.169.311, hal ini dikarenakan adanya penurunan pembagian laba keuangan dari lembaga keuangan, pada tahun 2016 HPK Dyd sebesar Rp. 3.673.073.042,80 atau mengalami peningkatan sebesar 35,43 persen atau sebesar Rp. 3.673.073.042,80 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 adanya peningkatan penerimaan dari HPK Dyd sebesar Rp. 11.721.339.417,19 atau terjadi kenaikan sebesar 219,11 persen.

Lain-lain PAD yang Sah mengalami peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2016 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp. 52.632.007.590,00



atau mengalami peningkatan sebesar 10,81 persen atau sebesar Rp. 58.319.491.230,00 pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 69.319.491.230,00 atau terjadi kenaikan sebesar 15,87 persen.

3.2.3. Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 s.d. 2018

Selain PAD, Dana Perimbangan juga merupakan sumber pendapatan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Dana Perimbangan berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dana Perimbangan terdiri dari DBH, DAU dan DAK. Tabel 3.23.7 berikut ini menyajikan komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Sarolangun Jambi Tahun 2014 s.d. 2018.

Tabel. Tabel 3.23.6
Komposisi Dana Perimbangan
Kabupaten Sarolangun (juta rupiah)
Tahun 2014-2018

No	Jenis Penerimaan	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah	%
1	Dana Bagi Hasil	162,502	164,198	91,065	100,806	83,818	602,389	14.72
2	DAU	521,591	517,687	587,491	588,319	583,152	2,798,240	68.39
3	DAK	47,315	56,644	195,785	191,396	199,590	690,730	16.88
	Jumlah	733,422	740,544	874,342	880,523	866,560	4,091,359	

Sumber : BPKAD Kabupaten Sarolangun

Penerimaan dana perimbangan Kabupaten Sarolangun paling besar dari DAU yaitu sebesar 68,39 persen, DAK sebesar 16,88 persen dan yang paling rendah DBH hanya sebesar 14,72 persen. Besarnya alokasi DAU untuk daerah bertujuan untuk membiayai kewenangan pelimpahan penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mengatasi ketimpangan antar daerah. Besar dan kecilnya DBH yang diterima Pemerintah Kabupaten Sarolangun, disebabkan pengalokasian DBH untuk daerah-



daerah berdasarkan daerah penghasil dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi adanya daerah penghasil dari sumber kekayaan alam yang ada di Provinsi Jambi. DAK dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3.2.4. Komposisi Belanja Kabupaten Sarolangun Tahun 2014 s.d. 2018.

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah daerah. Semakin besar belanja daerah diharapkan akan semakin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Komposisi Belanja Kabupaten Sarolangun tahun 2014 s.d. 2018 dapat dilihat pada :

Tabel. Tabel 3.23.7
Komposisi Belanja Kabupaten Sarolangun
Tahun 2014 s.d. 2018.

No	Jenis Belanja	Tahun 2014	%	Tahun 2015	%	Tahun 2016	%	Tahun 2017	%	Tahun 2018	%
1	Belanja langsung	413,32	45,3	483,97	49,9	589,84	51,7	636,58	54,08	540,581	45,9
		2	5	5	9	0	8	8			2
2	Belanja Tak Langsung	498,02	54,6	484,24	50,0	549,29	48,2	540,58	45,92	636,588	54,0
		1	5	3	1	2	2	1			8
	Jumlah	911,34		968,21		1,139,1		1,177,1		1,177,1	
		3		8		32		69		69	

Sumber : BPKAD Kabupaten Sarolangun

Tabel 3.23.7. di atas dapat kita lihat bahwa belanja langsung mengalami peningkatan setiap tahunnya begitu juga belanja tidak langsung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa belanja Pemerintah Kabupaten Sarolangun masih didominasi untuk belanja operasional (belanja pegawai dan belanja barang jasa) dan mengalokasikan sebagian besar penerimaan daerah untuk membiayai operasional



pemerintah daerah, khususnya untuk belanja pegawai. Oleh sebab itu baiknya belanja langsung dapat dikurangi pembelanjannya karena banyak terserap untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja tidak langsung adanya belanja modal yang merupakan komponen belanja yang lebih banyak dan memiliki pengaruh langsung terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.

3.2.5. Kesehatan Keuangan Daerah

Kesehatan keuangan daerah menjadi satu faktor yang sangat penting dalam mendorong terciptanya suatu harmonisasi pembangunan Daerah. Fungsi keuangan daerah dalam hal ini dapat diibaratkan sebagai indikator penting yang senantiasa memberikan kehidupan bagi sektor-sektor ekonomi dan pembangunan daerah guna aktualisasi produktivitas daerah secara keseluruhan. Adapun indikator keuangan daerah dapat dianalisis salah satunya melalui analisis Kapasitas Fiskal Daerah dan Analisis Ruang Fiskal Daerah.

3.2.6. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal adalah kemampuan keuangan suatu daerah yang dicerminkan melalui Penerimaan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan yang dikaitkan dengan Belanja Pegawai dan Jumlah Penduduk miskin.

$$\text{Kapasitas Fiskal Daerah} = \frac{(PAD + DBH + DAU + PL) - BP}{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}$$

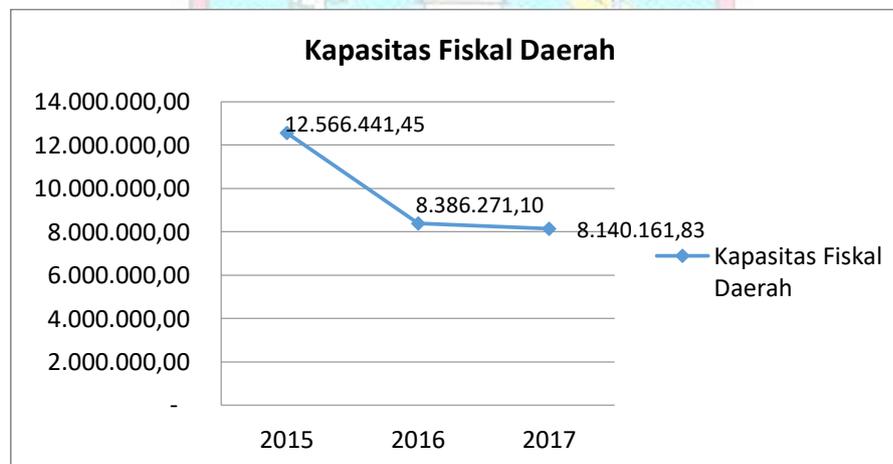
Keterangan :



- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DBH : Dana Bagi Hasil
- DAU : Dana Alokasi Umum
- PL : Penerimaan Lain-Lain yang Sah kecuali DAK, Dana Darurat, Dana Pinjaman lama dan Penerimaan.
- BP : Belanja Pegawai

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bagaimana perkembangan kapasitas fiskal daerah Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

Grafik Tabel 3.2.
Perkembangan Fiskal Daerah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2015-2017



Selama periode tahun 2015-2017, kapasitas fiskal Kabupaten Sarolangun terus mengalami penurunan. Ini bermakna terjadi penurunan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam kerangka menjalankan agenda-agenda pemerintahan dan pembangunan daerah. Penurunan ini terjadi dikarenakan terjadinya Penurunan Pendapatan Asli Daerah Kab. Sarolangun.



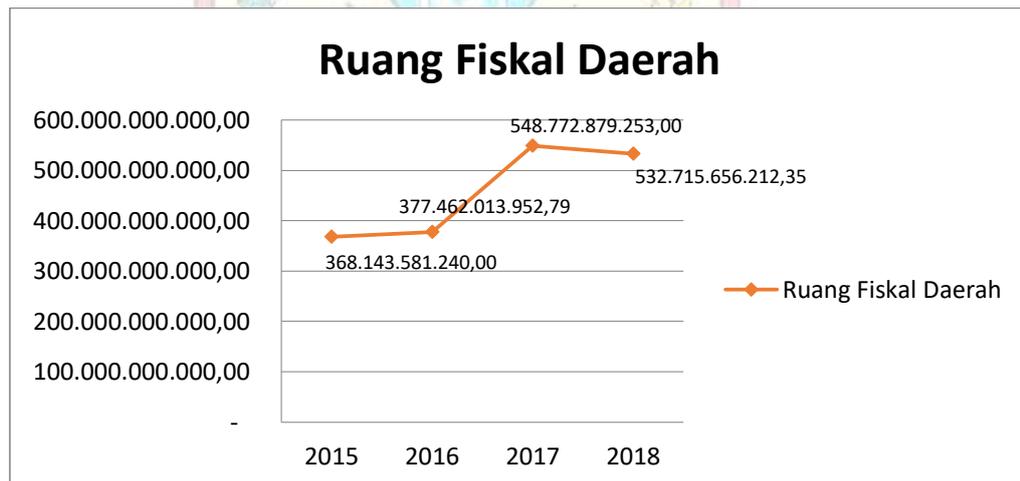
3.2.7. Analisis Ruang Fiskal Daerah

Indikator Ruang Fiskal menunjukkan jumlah dana netto yang masih bisa digunakan oleh Pemerintah Daerah setelah pendapatan non earmarked dikurangkan dengan belanja pegawai tidak langsung.

$$\text{Ruang Fiskal Daerah} = \text{Total Pendapatan} - (\text{DAK} + \text{Pendapatan Hibah} + \text{Dana Darurat} + \text{Dana Penyesuaian Otsus}) - \text{Belanja Pegawai Tidak Langsung}.$$

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui pula bagaimana kondisi ruang fiskal daerah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana berikut :

Grafik Tabel 3.3.
Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Sarolangun
Tahun 2015-2017



Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa, selama periode tahun 2015-2017, ruang fiskal Kabupaten Sarolangun terus mengalami peningkatan. Ini bermakna semakin longgarnya keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam kerangka menjalankan agenda-agenda pemerintahan dan pembangunan daerah. Peningkatan



terjadi signifikan pada tahun 2017, hal ini dikarenakan tidak adanya pendapatan yang diperoleh Kabupaten Sarolangun yang bersumber dari Dana Penyesuaian/Oto

Anggaran Pendapatan dan Realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun tahun 2018, adalah sebagai berikut:

3.3. PENDAPATAN

Dengan berpedoman kepada aturan yang ada, maka bagian pendapatan daerah telah dicantumkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 11 tahun 2017 Kabupaten Sarolangun Tahun 2108.

Pada tahun anggaran 2018, pendapatan Kabupaten Sarolangun sebesar Rp. 1.173.306.515.023,15 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 99.780.471.647,19 Dana Perimbangan Sebesar Rp. 737.923.144.394,00, Sampai akhir tanggal 31 desember 2018 pendapatan Kabupaten Sarolangun terealisasi sebesar Rp. 1.226.417.237.621,00 atau 104,53%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp. 123.567.993.808,64 atau 100,43% kemudian Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp. 843.647.702.957,00 atau 123,84%.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LKj Pemerintah Kabupaten Sarolangun merupakan sarana evaluasi dan perbaikan diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana tercermin dalam Visinya mewujudkan **SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA**, dalam RPJMD Kabupaten Sarolangun Tahun 2017-2022 telah menetapkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam rentang satu tahun anggaran, dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana amanat Perpres Nomor 29 tahun 2014, dan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal.



Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja.

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, pencapaian indikator sasaran belum maksimal dicapai pada tahun kedua, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang maksimal dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.





PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN **INSPEKTORAT**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Telp. (0745) 9270687
SAROLANGUN

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN ANGGARAN 2018

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Sarolangun, 27 Maret 2019.

INSPEKTUR KABUPATEN SAROLANGUN


Drs. H. MUSLIHADI, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19651231 199203 1 091